



LAPORAN KINERJA

TAHUN
2023



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG**

Tanjungpandan, Februari 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 dapat terlaksana.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Belitung ini bertujuan untuk melaporkan akuntabilitas sekaligus melaporkan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang menjadi tolok ukur kebertanggungjawaban suatu instansi dalam upaya mencapai tujuan serta kemajuan menjalankan misi organisasi.

Dengan telah terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 ini, kami berharap bahwa laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung di Tahun Anggaran 2023 dan untuk menjadi acuan dalam penyempurnaan pelaksanaan kegiatan ditahun 2024 yang akan datang.

Tanjungpandan, 29 Februari 2024
Kepala Dinas,

DS KASMIN, S.IP., MAB
Pejabat Utama Muda
NIP. 196908241990031004

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi	2
1.3 Aspek Strategis Organisasi	10
1.4 Sistematika Laporan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Target Kinerja Tahun 2018 - 2023	16
2.2 Target Kinerja Tahun 2023	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023	46
3.2 Kinerja Lainnya Tahun 2023	120
3.3 Akuntabilitas Keuangan	131
BAB IV PENUTUP	150
4.1 Kesimpulan Umum	150
4.2 Langkah Perbaikan Ke Depan	151
LAMPIRAN	153

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPPA) Kabupaten Belitung Tahun 2018 - 2023 tujuan dari DSPPPA adalah untuk mendukung tujuan pembangunan Bupati Belitung yaitu Tujuan pembangunan di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dan di bidang kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, dan di Kabupaten Belitung, oleh karena itulah perlunya penjabaran rencana program dan kegiatan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 3 Tujuan dan 3 sasaran yang memuat 3 indikator Tujuan dan 3 Indikator sasaran pada Renstra Perubahan 2018 – 2023 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Pencapaian dari 6 Indikator tujuan dan sasaran pada tahun 2023 ini secara garis besar berhasil mencapai target.

Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan indikator Status Kabupaten Layak Anak (KLA), Tahun 2023 Kabupaten Belitung meraih penghargaan Status KLA Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Hal ini tidak terlepas dari komitmen dan sineritas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Instansi terkait Pemenuhan Hak Anak.

Faktor pendukung lainnya dari pelaksanaan program/ kegiatan yaitu adanya sarana dan prasarana pendukung dan anggaran yang memadai serta adanya koordinasi yang baik dengan OPD terkait. Adapun Faktor penghambat yaitu data yang belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan secara baik dalam penyusunan, pelaksanaan program/ kegiatan/ kebijakan, serta faktor kuantitas dan kualitas SDM di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Pada Tahun Anggaran 2023, terdapat 11 program, 20 kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Belanja Langsung / kegiatan sebesar Rp. 10.922.821.301,- dan Realisasi Anggaran Rp. 9.946.030.498,- atau 91,06%.

Untuk itu ada beberapa langkah-langkah yang harus lebih ditekankan pada masa-masa mendatang, diantaranya :

1. Peningkatan Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi SDM melalui Diklat Kompetensi baik fungsional maupun Struktural.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang pelayanan publik.

Pencapaian kinerja saat ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja Tahun 2023 ini juga merupakan bagian evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan untuk penyempurnaan berbagai kebijakan di bidang keuangan daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja Instansi yang dipimpinnya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan suatu perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah mengatur tatacara tentang bagaimana Instansi Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sedangkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengharuskan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan tersebut, maka diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi, yang dapat menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 merupakan hasil evaluasi kinerja selama 1 (satu) tahun yang diperlukan sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak waktu yang akan datang.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Belitung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memiliki kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Daerah.

c. Fungsi

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelayanan umum dalam lingkup sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. penyusunan program kerja dan anggaran, pengelolaan administrasi ASN, urusan rumah tangga, dan tata usaha; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat lihat melalui bagan struktur organisasi berikut ini:

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG
 NOMOR 80 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG**



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 SUPARNO, S.H.
 NIP. 19800315 200903 1 003

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik daerah/negara;
- d. Pengelolaan urusan ASN;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial, bencana lainnya serta pelaksanaan jaminan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;

- e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- g. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- h. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalah-gunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- i. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga dan perlindungan jaminan sosial;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis, administrasi, koordinasi dan pembinaan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin pedesaan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan fakir miskin perkotaan;
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi

- pelaksanaan penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten;
 - h. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyusunan kebijakan, penyelenggaraan program, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk menjalankan tugas, Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta organisasi perempuan dan partisipasi masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyiapkan perumusan kebijakan, penyelenggaraan program, mengoordinasikan, memfasilitasi, mensosialisasikan, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pada bidang perlindungan perempuan dan anak.

Untuk menjalankan tugas, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- c. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyusunan serta penerapan kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perempuan dan anak;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- g. Pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- h. Pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan, pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Jumlah pegawai pada Tahun 2023 sebanyak 41 orang terdiri dari 27 orang PNS, 14 Orang tenaga honorer.

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai menurut Jenis Pendidikan
Per 31 Desember 2023

NO	JENIS PENDIDIKAN	STATUS PEGAWAI						JUMLAH	
		PNS		PPPK		HONORER		L	P
		L	P	L	P	L	P		
I	TENAGA SARJANA								
1	S2 Manajemen Ekonomi Publik	1	0					1	0
2	Sarjana Sosial / Kesejahteraan Sosial /	0	1	1	1			1	2

	Kessos Umum								
3	Sarjana Sistem Informasi	1	0					1	0
4	Sarjana Agama Islam	1	0					1	0
5	Sarjana Administrasi Negara	2	1					2	1
6	Sarjana Manajemen Keuangan	0	1					0	1
7	Sarjana Sosiologi	0	1					0	1
8	Sarjana Pekerjaan Sosial	0	1					0	1
9	Sarjana Pendidikan	1	0					1	0
10	Sarjana Teknik Kimia	0	1					0	1
11	Sarjana Perikanan	1	0					1	0
12	D – IV Pekerja Sosial	3	0					3	0
13	Sarjana Psikologi	2	1	0	1			2	2
14	Sarjana Hubungan Internasional	1	0					1	0
15	D4 Manajemen Informatika					1	0	1	0
16	Sarjana PGSD / Penjas					1	0	1	0
Total		13	7	1	2	2	0	16	9

II	TENAGA SARJANA MUDA /AKADEMI/D3								
1	D3 Manajemen Informatika	0	2					0	2
2	D3 Perpajakan	0	1					0	1
3	D3 Akuntansi	0	1					0	1
4	D3 Manajemen Administrasi Perkantoran					0	0	0	0
Total		0	4			0	0	0	4
III	SEKOLAH MENENGAH ATAS								
1	SMA/ SMU	2	0			4	3	6	3
2	SMEA/ SMK	0	0			0	1	0	1
3	STM	0	0					0	0
4	SMKK	0	1					0	1
5	SMP	0	0			1	0	1	0
Total		2	1	0	0	5	4	7	5
JUMLAH TOTAL		15	12	1	2	7	4	23	18

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

1.3.1. Isu Strategis

Salah satu dasar penyusunan Renstra PD adalah isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Dalam penentuan isu-isu strategis telah dilakukan pemetaan urusan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melakukan pemetaan dan telaahan atas hasil kegiatan dan diskusi serta rapat pembahasan penyiapan renstra.

Adapun yang menjadi isu-isu strategis pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung adalah:

1. Belum optimalnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas hidup perempuan.

1.3.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan /Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
13. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
15. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
16. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
18. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109), sebagaimana diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
30. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 – 2019;
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
36. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2015 – 2019;
37. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
38. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
39. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1236);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

41. Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);
42. Peraturan Daerah (PERDA) No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
43. Peraturan Bupati Belitung Nomor 80 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun dengan sistematika mendasar pada Anak Lampiran II/1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada spek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan target kinerja tahun 2018 – 2023 dan Perjanjian kinerja 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 TARGET KINERJA TAHUN 2018 – 2023

Target Kinerja Tahun 2018-2023 tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Renstra Dinas menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program untuk pencapaian sasaran untuk mendukung visi dan misi Bupati yang sesuai tema, prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS dengan indikator persentase penurunan PMKS per tahun;
Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya penanganan PMKS, dengan indikator sasaran :
 - Jumlah PMKS yang tertangani dibagi jumlah PMKS dikali 100%.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya kualitas hidup perempuan, dengan indikator sasaran :
 - Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.

3. Terpenuhinya Hak Anak dengan Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA);
Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya kualitas hidup anak, dengan indikator sasaran :
 - Prevalensi kekerasan terhadap anak;
4. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik.
Sasaran yang dicapai dari tujuan keempat meliputi sebagai berikut:
 - Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah, dengan indikator sasaran :
 - Indeks kepuasan.

2.1.2. Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
2. Peningkatan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah;
4. Peningkatan kualitas kinerja aparatur;

Adapun kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS;
2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin;
3. Peningkatan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial;
4. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan.
5. Peningkatan peran anak dalam pembangunan
6. Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah;
7. Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur;
8. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur;

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini.

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun 2018 – 2023

Visi	: Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023		
Misi I	: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1. Meningkatnya penanganan PMKS	1. Peningkatan Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; 2. Meningkatkan pemberdayaan sosial masyarakat miskin; 3. Peningkatan kualitas data dan sasaran penerima program perlindungan sosial.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan	1. Peningkatan Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan	1. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan
3. Terpenuhinya Hak Anak	1. Meningkatnya kualitas hidup Anak	1. Peningkatan Pelembagaan Forum Anak dan peningkatan Kabupaten Layak Anak	1. Peningkatan peran anak dalam pembangunan

Misi II	: Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	1. Penyempurnaan sistem pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah. 2. Peningkatan kualitas kinerja aparatur	1. Peningkatan akurasi pelaporan kinerja dan keuangan Perangkat Daerah.

Program

Program yang ditetapkan untuk melaksanakan strategi dan kebijakan guna mencapai sasaran dan tujuan dalam tahun 2022 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
7. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
8. Program Perlindungan Perempuan;
9. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
11. Program Perlindungan Khusus Anak.

Kegiatan

Sementara kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan program-program yang ada dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja). Dalam penyusunan Rencana Kinerja memuat sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023, dimana sasaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan memuat informasi yang meliputi:

- a. Indikator Kinerja

- b. Rencana Tingkat Capaian (Target)
- c. Program yang akan dilaksanakan
- d. Kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program
- e. Indikator Kinerja kegiatan, antara lain:
 - Masukkan (input)
 - Keluaran (Output)
 - Hasil (Out Comes)

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
8. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
9. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
10. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
12. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota;
13. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota;
14. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota;

15. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
16. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
17. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
18. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota;
19. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
20. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan

Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan dan program-program yang ada dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan (Renja) 2023.

Terdapat 45 Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun Anggaran 2022, dijabarkan dalam tabel 2.2. dibawah ini.

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran terdapat dalam tabel 2.2 berikut :

TABEL 2.2.

PROGRAM DAN KEGIATAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS Per tahun	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 100%	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 1. Penyediaan Permakanan	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial. • Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							<p>2. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</p> <p>3. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. • Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, dan spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/ Kota.
							<p>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase PMKS lainnya yang menerima layanan rehabilitasi sosial

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							1. Penyediaan Permakanan 2. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota. Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota.
							3. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial sebesar 100%	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS aktif Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota
							3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota

						4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial sebesar 100%	<p>Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota; 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 	<p>Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota. • Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan social kesejahtreaan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota.

					Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten sebesar 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Korban bencana yang menerima bantuan sosial • Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang tertata sebesar 100%	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota.	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya pengelolaan Taman Makam Pahlawan
							Sub Keg. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kab/Kota

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
2	Terwujudnya peningkatan kualitas idup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kebijakan PUG
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota
							2. Advokasi Kebijakan Pelaksanaan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan

							Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
						Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya organisasi perempuan
						1. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota
						2. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik,

							Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	
						Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Forum Puspa Kabupaten Belitung	
						1. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	
					Program Perlindungan Perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi

							Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
							Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Sebanyak 25%	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data gender dan anak
							1. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia
3.	Terpenuhinya Hak Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama	Kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tercapainya peningkatan status KLA

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
							Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Forum Anak Kabupaten Belitung
							1. Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten 100%	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan perlindungan anak tingkat Desa/ Kelurahan
							1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
4.	Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
							1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
							2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen keuangan perangkat daerah
							1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
							2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
						2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		

						3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah
							1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
							2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
							3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah Tangga yang disediakan
							4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan
							5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
							6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan
							7. Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

							Konsultasi SKPD	SKPD
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran
							1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
							2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
							3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN / SUB
						4.Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran
							1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
							2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan.
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang milik daerah dalam kondisi baik
							1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

							2. Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara
							3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
							4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi.

2.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan menjadi satu dalam pentapan Indikator Kinerja Utama milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung. Dalam dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2022 ini, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Belitung dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung. Adapun IKU Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada Tahun Ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS		Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	80%	80%	80%	80%	80%
2.	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	42,62	43,91	45,11	46,35	47,00
		Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	7,89	5,7	5,5	5,3	5,1

3.	Terpenuhinya hak anak		Kabupaten Layak Anak (KLA)	70	75	80	83	85
		Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	-	5,0	4,8	4,6	4,4

2.1.4. Rencana Kinerja (Renja)

Sesuai dengan Rencana Kinerja untuk satuan dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023, maka Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana tertuang dalam format Rencana Kerja Tahunan (Renja) terlampir.

2.2. TARGET KINERJA TAHUN 2023

2.2.1. Indikator dan Target Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mengacu pada Dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	2		3	4
1.1.	Tujuan :			
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1.	Persentase penurunan PMKS per Tahun	0,5
1.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya penanganan PMKS	2.	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	80%
2.1.	Tujuan :			
1	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	47
2.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	4.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,1
3.1.	Tujuan :			
1	Terpenuhinya hak anak	5.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama (85%)
3.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya kualitas hidup anak	6.	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,4

2.2.2. Rencana Anggaran

Dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai yang di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, melalui indikator kinerja masing-masing sasaran strategis maka pada tahun anggaran 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung melaksanakan serangkaian program dan kegiatan dengan anggaran induk belanja langsung sebesar Rp. 5.805.408.075,- Anggaran tersebut mengalami perubahan dalam mekanisme Perubahan APBD tahun anggaran 2023 menjadi sebesar Rp. 6.211.900.438.-

Adapun anggaran Belanja Langsung Tahun 2023 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis per Bidang Urusan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Anggaran Belanja Langsung per Tujuan/Sasaran Strategis

NO	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp.)		
		2021	2022	2023
1	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya penanganan PMKS	2.936.858.445	6.252.962.747	5.309.619.487
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup perempuan	839.384.980	1.141.754.930	663.749.665
3	Tujuan: Terpenuhinya hak anak Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak	194.015.075	216.738.166	328.531.286
JUMLAH		3.970.258.500,-	7.611.455.843,-	6.211.900.438,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, Renja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Predikat Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
< 100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
> 100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Kategori Capaian Kinerja

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	> 90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah menetapkan Indikator Kinerja Tahun 2023 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 khususnya pada Misi ke-1 (satu) RPJMD yaitu **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan.**

Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitang Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kinerja
			2022				2023			
1.1. 1	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS per tahun	0,5	0,96	192,00	Sangat Baik	0,5	18,39	3678	Sangat Baik
1.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80%	97,79%	123,49	Sangat Baik	80%	98,29%	122,86	Sangat Baik
2.1. 1	Tujuan : Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,35	53,02	114,39	Sangat Baik	47	53,42	113,66	Sangat Baik
2.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,3	3,28	61,89	Baik (Indikator negatif)	5,1	5,25	102,94	Cukup (Indikator negatif)
3.1. 1	Tujuan : Terpenuhinya Hak Anak	Kabupaten Layak Anak	Pratama (83%)	58,15%	70,06	Cukup	Pratama (85%)	Madya	117,84	Sangat Baik
3.1. 2	Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,6	9,50	206,52	Cukup (Indikator Negatif)	4,4	12,97	297,77	Cukup (Indikator Negatif)

3.1.1. Ralisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 - 2023

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun-tahun pada Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2018 - 2023. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.4

Realisasi dan Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal	Target					Realisasi					Persentase Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.1. Tujuan Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS pertahun	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5,93	-5,01	-8,79	0,96	18,39	1186	-1002	-1758	192	3678
1.2 Sasaran Meningkatnya Penanganan PMKS	Peresentase penanganan PMKS yang tertangani	73,85	80	80	80	80	80	83,89	94,78	97,69	98,79	98,29	104,86	118,48	122,11	123,49	122,86
2.1 Tujuan Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	54,27	42,62	43,91	45,11	46,35	47	43,07	53,11	53,02	53,02	53,42	101,06	120,95	117,53	114,39	113,66
2.2 Sasaran Meningkatnya Kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	-	7,89	5,7	5,5	5,3	5,1	8,17	3,09	4,13	3,28	5,25	103,55	54,21	75,09	61,89 (Indikator Negatif)	102,94 (Indikator Negatif)
3.1 Tujuan Terpenuhinya Hak Anak	Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	70	75	80	83	Pratama (85%)	60,9	60,9	58,37	58,15	Madya	87	81,2	72,96	70,06	117,84
3.2 Sasaran Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	-	-	5	4,8	4,6	4,4	-	2,84	1,81	9,5	7,49	12,97	56,8	37,71	206,52 (Indikator Negatif)	294,77 (Indikator Negatif)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023
Berdasarkan Persentase

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2 (negatif)
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	4

Dengan demikian terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak memenuhi target kinerja yakni :

- Indikator prevalensi kekerasan terhadap perempuan dengan capaian 5,25 dari target 5,1. Indikator ini merupakan indikator negatif dimana perempuan korban tindak kekerasan melebihi target dan meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 30 orang menjadi 49 orang di tahun 2023.
- Indikator Pervalensi kekerasan anak dengan capaian 12,97 jauh di atas target 4,4 di tahun 2022. Target ini merupakan target negatif, dimana target ini melebihi dari target yang ditetapkan. Anak yang memerlukan perlindungan khusus (anak korban kekerasan, anak dengan disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum) meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 50 orang menjadi 74 orang di tahun 2023, namun dikarenakan ini merupakan indikator negatif, jadi secara kinerja belum tercapai dengan baik.

Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang melebihi target yaitu :

- Indikator persentase penurunan PMKS per tahun dengan capaian 18,39 dari target 0,5. Terdapat penurunan jumlah PMKS dari tahun sebelumnya.
- Indikator Persentase PMKS yang tertangani dengan capaian 98,29% dari target 80%. Indikator ini memuat dari jumlah PMKS yang ditangani dibagi jumlah PMKS keseluruhan (26 jenis PMKS) dikali 100%.
- Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Nilai IDG tahun 2023 masih menggunakan nilai IDG tahun 2022 yaitu 53,42 dari target 47, dikarenakan untuk nilai IDG tahun 2023 belum rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) dari status KLA pratama menjadi KLA Madya.

Jika dilihat berdasarkan katagori maka capaian kinerja utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada

Tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2023
Berdasarkan Kategori

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	> 90	4
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	2 (Indikator Negatif)
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari Tabel 3.5 diperoleh gambaran bahwa indikator kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada Tahun 2023 berada pada katagori “Sangat Baik”(capaian >90) yang dicapai pada 4 (empat) indikator, 2 (dua) indikator dengan kategori cukup (indikator negatif). Dengan demikian jika dilihat dari katagori yang ada secara umum kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berada dalam katagori “Baik”.

3.1.2. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Laporan Kinerja Perangkat Daerah tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh perolehan masing-masing indikator kinerja, sebagaimana yang ditunjukkan oleh pencapaian rencana tingkat capaian (Target), tetapi juga harus menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat Keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan atau kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Keberhasilan dari Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 ditunjukkan dengan tercapainya rencana tingkat capaian (target) baik Program, Kegiatan, Sub Kegiatan maupun Sasaran.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Renja Tahun 2023.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Indikator Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 yang ditandatangani tanggal 5 Januari 2023 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 yang ditandatangani tanggal 25 Oktober 2023 dan 14 November 2023 telah ditetapkan 6 (enam) tujuan/sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Tujuan/Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Belitung

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.1.	Tujuan :			
1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	1.	Persentase penurunan PMKS per Tahun	0,5
1.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya penanganan PMKS	2.	Persentase penanganan PMKS yang tertangani	80%
2.1.	Tujuan :			
1	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	47
2.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	4.	Prevalensi kekerasan terhadap Perempuan	5,1
3.1.	Tujuan :			
1	Terpenuhinya hak anak	5.	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama (85%)
3.1.	Sasaran Strategis :			
2	Meningkatnya kualitas hidup anak	6.	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,4

Gambaran perbandingan tujuan/ sasaran strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.8
Tujuan/Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas Sosial,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung

Tujuan 1 Strategis 1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS Meningkatnya penanganan PMKS	2 indikator
Tujuan 2 Strategis 2	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Meningkatnya kualitas hidup perempuan	2 indikator
Tujuan 3 Strategis 3	Terpenuhi hak anak Meningkatnya kualitas hidup anak	2 indikator

Dengan 6 (enam) tujuan/sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang ditargetkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dapat merealisasikan capaian untuk masing-masing sasaran strategis sebanyak 4 (empat) indikator tercapai melebihi target, 2 (dua) indikator belum tercapai target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran %	Predikat
1	Tujuan Strategis 1	1	3678	Tercapai melebihi target
2	Sasaran Strategis 1	1	122,86	Tercapai melebihi target
3	Tujuan Strategis 2	1	113,66	Tercapai melebihi target
4	Sasaran Strategis 2	1	102,94	Tercapai melebihi target (Indikator negatif)
5	Tujuan Strategis 3	1	117,84	Belum tercapai
6	Sasaran Strategis 3	1	294,77	Belum tercapai (Indikator negatif)

Berdasarkan nilai skor yang diperoleh secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berada dalam kategori Baik untuk semua indikator baik pada indikator tujuan maupun indikator sasaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 -49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1	Tujuan Strategis 1	1	3678					√
2	Sasaran Strategis 1	1	122,86					√
3	Tujuan Strategis 2	2	113,66					√
4	Sasaran Strategis 2	1	102,94					√ (Indikator negatif)
5	Tujuan Strategis 3	1	117,84					√
6	Sasaran Strategis 3	1	294,77					√ (Indikator negatif)

Tujuan/Sasaran strategis 1

Tujuan 1 : Meningkatnya kesejahteraan PMKS

Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan PMKS

Tujuan Strategis 1 Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran Strategis 1 Meningkatnya penanganan PMKS dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat. Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja:

1. Persentase penurunan PMKS per tahun; target pada tahun 2023 adalah 0,5 di Kabupaten Belitung.
2. Persentase PMKS yang tertangani, pada tahun 2023 ditargetkan 80% di Kabupaten Belitung

Hasil evaluasi capaian tujuan 1 dan sasaran 1 tahun 2023, dengan 2 (dua) indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian 1898,43% dan termasuk kategori sangat baik.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tujuan : Persentase penurunan PMKS Per tahun %	0,5	0,96	0,5	18,37	192,00	3678
2	Sasaran : Persentase penanganan PMKS %	80%	98,79%	80%	98,29%	123,49	122,86
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran						157,75	1900,43

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 1 Meningkatnya kesejahteraan PMKS, dengan indikator persentase penurunan PMKS per tahun dan Sasaran Strategis 1 Meningkatnya penanganan PMKS dengan indikator persentase penanganan PMKS tahun 2022 adalah sebesar 157,75% dan tahun 2023 sebesar 1900,43%, meningkat dari tahun sebelumnya.

Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2022	2023		
1	Persentase penurunan PMKS Per tahun	%	0,96	18,39	17,43	
2	Persentase penanganan PMKS	%	98,79%	98,29%	-0,5	

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13.

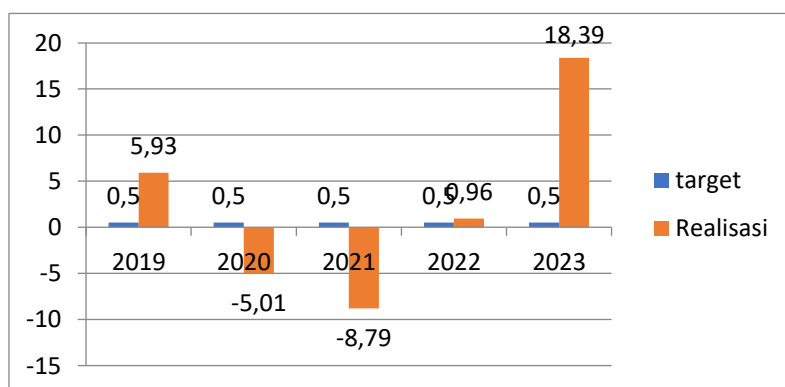
Pencapaian Tujuan/ Sasaran Persentase Penurunan PMKS per Tahun

No.	Indikator Kinerja	Realiasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 2023 terhadap Target akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1	Persentase penurunan PMKS Per tahun	0,96	0,5	18,39	3678	0,5	18,39
2	Persentase penanganan PMKS	98,79	80	98,29	122,86	80	98,29

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1) Persentase penurunan PMKS per tahun

Perkembangan realisasi persentase penurunan PMKS per Tahun untuk tahun 2019-2023 disajikan pada gambar 3.1 berikut :



Grafik 3.1. Target dan realisasi persentase penurunan PMKS per tahun

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran “Persentase penurunan jumlah PMKS” dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, nilai minus disini dimaksudkan PMKS tidak mengalami penurunan pertahunnya (jumlah PMKS meningkat) dan nilai positif dimaksudkan menurunnya jumlah PMKS dari tahun sebelumnya. Untuk jumlah PMKS tahun 2021 sebesar 14.829 (meningkat dari tahun

sebelumnya), dan tahun 2022 jumlah PMKS menurun dari tahun sebelumnya yaitu 14.686 dan Tahun 2023 jumlah PMKS menurun dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 11.986 Orang.

Jika dimasukkan dalam rumusan yang telah ditetapkan dalam IKU Perubahan Tahun 2018-2023 yaitu (Jumlah PMKS tahun n-1 dikurangi Jumlah PMKS tahun n) dibagi jumlah PMKS tahun n-1 dikali 100%. Maka didapatlah nilai minus 8,79 untuk tahun 2021, nilai positif 0,96 ditahun 2022, dan positif 18,39 tahun 2023.

Terjadinya peningkatan jumlah PMKS di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan adanya dampak pandemi Covid sehingga menyebabkan bertambahnya jumlah PMKS terutama untuk fakir miskin. Seiring dengan meredanya dampak pandemi covid di tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi penurunan jumlah PMKS, hal ini juga tentunya tidak terlepas dari fokus dan anggaran penanganan PMKS di Kabupaten Belitung terutama dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk penanganan PMKS.

Faktor pendukung lainnya yaitu adanya respon yang baik dari masyarakat Belitung terhadap penanganan PMKS, terjalinnya Sinergitas antar instansi dalam penanganan PMKS, adanya SDM yang kompeten di bidang sosial, dan tersedianya anggaran dan sarana prasarana. Sedangkan Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya data PMKS belum valid, masih ada beberapa SDM yang belum memiliki kompetensi di bidang sosial, masih terjadinya ego sektoral di berbagai lini, dan masih ada beberapa sub kegiatan yang memiliki anggaran terbatas. Dan solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS, perlunya peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial, menjalin sinergitas dengan berbagai pihak, penambahan anggaran, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Pencapaian Tujuan pertama ini juga didukung oleh Sasaran Pertama yaitu Meningkatnya penanganan PMKS dengan indikator persentase PMKS yang tertangani.

2) Persentase PMKS yang tertangani

Untuk mengukur kualitas meningkatnya penanganan PMKS pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakanlah indikator yaitu Persentase PMKS yang tertangani.

Pada indikator ini pengukuran yang dilakukan adalah persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.

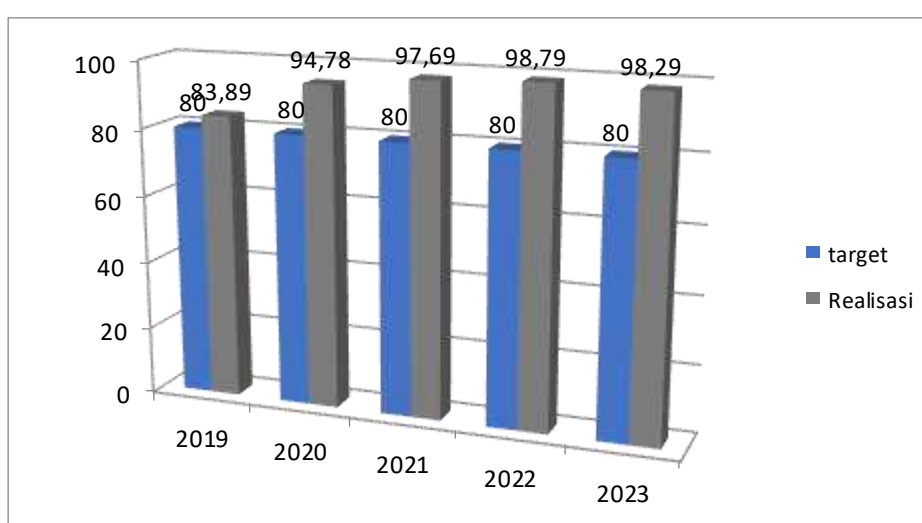
Tabel 3.14**Pelayanan dan Penanganan terhadap PMKS**

Tahun	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang tertangani	%
2019	14.337	12.028	83,89
2020	13.631	12.841	94,20
2021	14.829	14.487	97,69
2022	14.685	14.509	98,79
2023	11.986	11.781	98,29

Pada tabel 3.14. di atas dapat dilihat bahwa dari pelayanan dan penanganan PMKS dalam 3 tahun terakhir meningkat persentasenya.

Jumlah PMKS pada tahun 2020 menurun yaitu 13.631 orang yang memperoleh bantuan sosial menjadi 12.841 dari sebelumnya 14.337 orang atau sebesar 94,20%. Dan ditahun 2021 jumlah PMKS kembali meningkat sebesar 14.829 dan jumlah tertangani sebesar 14.487 dengan persentase meningkat penanganan PMKS meningkat 3,49% menjadi 97,69%. Tahun 2022 jumlah PMKS kembali menurun sebesar 14.685 dan jumlah tertangani sebesar 14.509 dengan persentase penanganan PMKS meningkat 1,1% dari tahun sebelumnya menjadi 98,79%. Dan Tahun 2023 jumlah PMKS menurun menjadi 11.986 dan jumlah tertangani sebesar 11.781 dengan persentase penanganan 98,29%. Persentase penanganan PMKS menurun 0,5% dari tahun sebelumnya namun masih melebihi target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu 80%.

Persentase penanganan PMKS juga dapat digambarkan dalam grafik 3.2. berikut ini :



Grafik 3.2. Penanganan PMKS tahun 2019 - 2023

Jumlah dan Jenis PMKS selama 5 tahun Renstra (2019 – 2023) terdapat dalam tabel 3.15. berikut :

Tabel 3.15. Jumlah dan Jenis Penanganan PMKS Tahun 2019 – 2023

No	Jenis PMKS	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)
1	Anak Balita Terlantar	1	1	100,00	0	0	0,00	71	71	100,00	71	71	100,00	2	2	100,00
2	Anak Terlantar	244	129	52,87	244	144	59,02	219	219	100,00	86	86	100,00	15	15	100,00
3	Anak yang berhadapan dengan Hukum	20	20	100,00	6	6	100,00	15	15	100,00	5	5	100,00	4	4	100,00
4	Anak Jalanan	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
5	Anak dengan Disabilitas	43	10	23,26	43	10	23,26	37	12	32,43	37	37	100,00	57	22	38,60
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	21	21	100,00	9	9	100,00	10	10	100,00	8	8	100,00	13	13	100,00
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	1	1	100,00	6	6	100,00	15	15	100,00	50	50	100,00	13	13	100,00
8	Lanjut Usia Terlantar	1163	1084	93,21	1163	993	85,38	1163	1163	100,00	1154	1154	100,00	60	60	100,00
9	Penyandang Disabilitas (PACA)	705	134	19,01	612	125	20,42	612	295	48,20	612	435	71,08	632	475	75,16
9.a	Penyandang Disabilitas Terlantar													30	30	
10	Tuna Susila	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
11	Gelandangan	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	39	39	-
12	Pengemis	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
13	Pemulung	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
14	Kelompok Minoritas	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-

No	Jenis PMKS	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)	Jumlah PMKS	Jumlah PMKS yang ditangani	Persentase (%)
15	Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBLP)	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-	n/a	n/a	-
16	Orang dengan HIV/AIDS	48	48	100,00	16	16	100,00	16	16	100,00	16	16	100,00	16	16	100,00
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	4	100,00	4	4	100,00	6	6	100,00	4	4	100,00	14	1	7,14
18	Korban Trafficking	2	2	100,00	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
19	Korban Tindak Kekerasan	44	44	100,00	28	28	100,00	40	40	100,00	32	32	100,00	51	51	100,00
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	18	18	100,00	18	18	100,00	12	12	100,00	13	13	100,00	0	0	100,00
21	Korban Bencana Alam	384	384	100,00	11	11	100,00	32	32	100,00	16	16	100,00	15	15	100,00
22	Korban Bencana Sosial	38	38	100,00	8	8	100,00	17	17	100,00	2	2	100,00	9	9	100,00
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	n/a	n/a	0,00	n/a	n/a	0,00	1096	1096	100,00	1096	1096	100,00	3465	3465	100,00
24	Fakin Miskin	11601	10090	86,98	11463	11463	100,00	11463	11463	100,00	11463	11463	100,00	7535	7535	100,00
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0	0,00	0	0	0,00	5	5	100,00	21	21	100,00	16	16	100,00
26	Komunitas Adat Terpencil	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jumlah		14337	12028	83,89	13631	12841	94,20	14829	14487	97,69	14686	14509	98,79	11986	11781	98,29

Meningkatnya penurunan PMKS per tahun dan meningkatnya penanganan PMKS ini dikarenakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung fokus penanganan PMKS mendukung Standar Pelayanan Minimal, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar lansia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti. Dengan meningkatnya pemberian bantuan tersebut dan fokus penanganan untuk pelayanan SPM maka persentase penanganan PMKS meningkat melebihi target yang ditetapkan.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Perbaikan data layanan PMKS menjadi tepat sasaran
- 2) Peningkatan berbagai program/ kegiatan yang menasar/ mengintervensi langsung kepada PMKS
- 3) Peningkatan Kerjasama lintas sektor. Kerjasama dengan Abiyoso Kemensos RI, Panti Bina Laras Belitung Timur, Pembangunan Rumah Singgah, dll.
- 4) Peningkatan kemampuan kompetensi PSKS, Karang Taruna, TKSK, PSM, dan lainnya. Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung/disebabkan antara lain oleh :
 - 1) Adanya kucuran dana, Dana Insentif Daerah (DID), Fiskal, dll
 - 2) Adanya pelaksanaan program hasil Kerjasama dengan Sentra Abiyoso, Kemensos RI.
 - 3) Adanya peningkatan sarana dan prasarana (Pembangunan Rumah Pelayanan Sosial).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan :

- 1) Meningkatkan SDM Pelayanan
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta kebijakan/ peraturan
- 3) Meningkatkan layanan rujukan/menambah Kerjasama dengan lintas sektor/ perluasan Kerjasama.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut :



Penyerahan Bantuan Permakanan kepada Lanjut Usia Terlantar



Penyerahan Bantuan Permakanan kepada Disabilitas Terlantar



Penyerahan Bantuan Permakanan kepada Anak Terlantar



Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar



Penyerahan Bantuan Sandang kepada Penyandang Disabilitas dari Sentra Abiyoso Cimahi

Pengukuran dan Pemasangan Alat Bantu Dengar kepada Penyandang Disabilitas dari Sentra Abiyoso Cimahi

Penyerahan bantuan sandang kepada lanjut usia dari sentra Abiyoso Cimahi bersama TKSK Kec. Selat Nasik



Kegiatan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, dan Anak Terlantar



Penelusuran Keluarga ODGJ

Penelusuran keluarga orang terlantar



Bantuan Sosial Tunai Dinsos Provinsi dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Belitung



Penyerahan santunan oleh Wakil Bupati Belitung terhadap korban bencana alam (angin puting beliung) Kelurahan Lesung Batrang Kec. Tanjungpandan



Monitoring data P3KE



Peresmian Rumah Pelayanan dan Perlindungan Sosial Kabupaten Belitung (29 November 2023)

Gambar 3.1. Dokumentasi foto kegiatan yang mendukung capaian Tujuan dan Sasaran Pertama

Capaian Tujuan/Sasaran 1 diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Program Rehabilitasi Sosial adalah Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial.

Untuk pencapaian indikator Program Rehabilitasi Sosial pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16

Pencapaian Indikator Program Rehabilitasi Sosial Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	100	100	100	100	100	100	-

Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti tahun 2023 sebesar 100% dimana jumlah penyandang disabilitas 30 orang, anak terlantar 15 orang, lansia terlantar 60 orang, gelandangan dan pengemis 39 orang yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berjumlah 144 orang dari 144 orang. Hal ini dikarenakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung fokus dalam penanganan PMKS terutama untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial.

Namun terkait dengan mutu layanan SPM pada aplikasi e-spm tidak mencapai 100% karena tidak semua penerima layanan SPM menerima dan memerlukan layanan sesuai dengan 15 kriteria yang ditetapkan.

Faktor Pendorong: Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar minimal kepada Masyarakat, Amanat Peraturan Perundang-undangan.

Faktor Penghambat: Rendahnya komitmen dalam pemenuhan pelayanan minimal, belum terpenuhinya sarana dan prasarana, Belum terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai, belum adanya Rumah Pelayanan Sosial, kendaraan operasional

dalam penanganan PMKS, data PMKS yang belum valid dan keterbatasan SDM Kesejahteraan Sosial.

Solusi yang dilakukan adalah

- 1) Mengoptimalkan Rumah Perlindungan dan Pelayanan Sosial dengan penyediaan sarana dan prasarana maupun kendaraan operasional.
- 2) Memverifikasi dan verifikasi data PMKS secara berkala.
- 3) Penyiapan dan Penguatan SDM Kessos melalui Diklat atau Bimtek.

Capaian indikator kinerja Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial adalah Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 100%.

Alokasi anggaran Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 472.694.420,- dengan realisasi sebesar Rp. 391.808.972,- setara dengan 82,89% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 472.694.420,- dengan realisasi sebesar Rp. 391.808.972,- atau setara dengan 82,89% *Output* kegiatan adalah jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. Faktor Pendorong: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (adanya Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial yang memerlukan pelayanan dasar minimal).

Faktor Penghambat: Terbatasnya jenis layanan yang disediakan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 215.740.750,- dan realisasi sebesar Rp. 212.227.500,- atau setara dengan 98,37%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor Pendorong: belum terpenuhinya kebutuhan permakanan bagi penerima layanan/ PPKS.

Faktor penghambat : belum terpenuhinya standar bantuan sesuai dengan standar gizi minimal yang diperlukan oleh penerima manfaat.

Upaya/solusi ke depan : membuat standar jumlah dan kualitas barang bantuan yang harus diterima penerima manfaat.

- b. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 109.270.250,- dan realisasi sebesar Rp. 95.502.340,- atau setara dengan 87,40%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor Pendorong : Tersedianya pendamping sosial

Faktor Penghambat : Keterbatasan anggaran.

Upaya/ solusi ke depan : memberikan pelatihan/ bimbingan teknis/ diklat dalam upaya peningkatan kapasitas pendamping sosial.

- c. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 61.803.670,- dan realisasi sebesar Rp. 44.792.982,- atau setara dengan 72,48%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota. Realisasi keuangan di bawah 80% dikarenakan sub kegiatan ini bersifat antisipatif dan insidental. Belanja perjalanan dinas dan belanja pengumuman/ iklan untuk mengumumkan anak terlantar tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya kasus penelantaran anak (anak yang dibuang).

Faktor Pendorong: Tersedianya pendamping sosial

Faktor Penghambat : Belum dapat dipastikan kasus penelantaran anak (anak yang dibuang).

Upaya/ solusi ke depan : memberikan pelatihan/ bimbingan teknis/ diklat dalam upaya peningkatan kapasitas pendamping sosial.

- (2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 85.879.750,- dan realisasi sebesar Rp. 39.286.150,- atau setara dengan 45.75%. *Output* kegiatan adalah Persentase PMKS

lainnya yang menerima layanan rehabilitasi sosial. *Outcome* kegiatan adalah Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti.

Faktor Pendorong : Banyaknya masyarakat yang memerlukan layanan Rumah Singgah dan Pemulangan bagi Pekerja Migran Terlantar kembali ke daerah asalnya.

Faktor Penghambat : belum optimalnya peran Tim Reaksi Cepat dalam penanganan PPKS.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.906.750,- dan realisasi sebesar Rp. 6.680.00,- atau setara dengan 67,43%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini terealisasi kurang dari 80% dikarenakan Sub Kegiatan ini bersifat antisipatif dan insidental tergantung dengan jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani, tergantung dari jumlah PMKS terlantar yang diberikan permakanan (orang terlantar/ pekerja migran terlantar di Kabupaten Belitung).

Faktor Pendorong : adanya masyarakat dengan kondisi terlantar yang memerlukan penyediaan permakanan.

Faktor Penghambat : belum optimalnya layanan rumah singgah/ rumah perlindungan dan pelayanan sosial.

Upaya/ Solusi ke depan : Optimalisasi layanan rumah singgah/ rumah perlindungan dan pelayanan sosial.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di luar panti yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.500.000,- atau setara dengan 9,09%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota. Realisasi kurang dari 80% dikarenakan Sub Kegiatan / Anggaran ini bersifat antisipatif bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang dalam kondisi sakit dan memerlukan jasa pengobatan bagi yang tidak memiliki atau tidak terdaftar di BPJS Kesehatan. Anggaran disediakan walaupun tidak digunakan, sebagai wujud standar pelayanan minimal.

Faktor Pendorong:

- sewaktu-waktu diperlukan pengobatan kepada pekerja migran/ orang terlantar

- pekerja migran/ orang terlantar tidak terdapat di layanan jaminan Kesehatan.

Faktor Penghambat: Belum optimalnya layanan Rumah Singgah/Rumah Perlindungan dan Pelayanan Sosial.

Upaya/ solusi ke depan : Optimalisasi layanan rumah singgah/ rumah perlindungan dan pelayanan sosial.

- c. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 59.473.000,- dan realisasi sebesar Rp. 313.106.150,- atau setara dengan 52,30%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota. Realisasi kurang dari 80% dikarenakan Sub Kegiatan ini Sifatantisipasi untuk PMKS terlantar. Tahun ini jumlah PMKS menurun dari tahun sebelumnya, sehingga biaya uang saku ataupun biaya pengiriman, sppd bagi PMKS terlantar tidak direalisasikan.

Faktor Pendorong:

- Adanya pekerja migran/ orang terlantar yang memerlukan layanan pemulangan ke daerah asal.
- Masih adanya kepedulian masyarakat dan instansi terkait (lintas sektor) terhadap pekerja migran/ orang terlantar.

Faktor Penghambat:

- Minimnya informasi tentang keluarga dari pekerja migran/ orang terlantar
- Tidak adanya/ tidak lengkapnya administrasi kependudukan pekerja migran/ orang terlantar.

Upaya/ solusi ke depan : membangun dan memperkuat jejaring lintas sektor baik di Kabupaten Belitung maupun di luar Kabupaten Belitung.

2. Program Penanganan Bencana

Indikator Program Penanganan Bencana adalah Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Untuk pencapaian indikator Program Penanganan Bencana pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Pencapaian Indikator Program Penanganan Bencana Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	100	100	100	100	-

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten tahun 2023 yaitu 100%. Dimana jumlah korban bencana yang terjadi di tahun 2023 yaitu 24 korban bencana (15 korban bencana alam dan 9 korban bencana sosial). Nilai persentase didapat dari rumusan Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah Kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi populasi korban bencana alam dan sosial kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten dikali 100%.

Faktor Pendorong: Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar minimal kepada Korban Bencana, Amanat Peraturan Perundang-undangan. Faktor Penghambat : Terbatasnya Anggaran.

Alokasi anggaran Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 444.430.180,- dengan realisasi sebesar Rp. 388.706.200,- setara dengan 87,46% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 444.430.180,- dengan realisasi sebesar Rp. 388.706.200,- setara dengan 87,46%. *Output* kegiatan adalah korban bencana yang menerima bantuan sosial. *Outcome* kegiatan terlayannya korban bencana.

Faktor Pendorong: Adanya relawan-relawan sosial dalam penanggulangan bencana
 Faktor Penghambat: Standar Operasional Pelayanan Kebencanaan yang belum terintegrasi.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 444.430.180,- dengan realisasi sebesar Rp. 388.706.200,- setara dengan 87,46%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor Pendorong : Dapat dilaksanakannya koordinasi serta simulasi kebencanaan.

Faktor Penghambat: Belum tersedianya anggaran dan peralatan kebencanaan yang memadai.

Upaya solusi ke depan : melakukan inventarisir peralatan penanggulangan bencana yang memadai dan tidak memadai.

3. Program Pemberdayaan Sosial

Indikator Program Pemberdayaan Sosial adalah Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial. Untuk pencapaian indikator Program Pemberdayaan Sosial pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18

Pencapaian Indikator Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	100	42,14	42,14	100	38,60	38,60	

Persentase PMKS yang menerima program bantuan sosial tahun 2023 sebesar 38,60% di bawah target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase ini didapatkan dari rumus jumlah penerima program pemberdayaan sosial 7535 KK (Data BPNT) dibagi jumlah penduduk miskin 19519 (Data DTKS) dalam dikali 100 persen. Bisa diartikan hanya 38,60 persen dari jumlah penduduk miskin yang dibantu dengan program BPNT yang merupakan program dan kuota bantuan dari Pusat.

Alokasi anggaran Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 408.808.768,- dengan realisasi sebesar Rp. 362.053.507,- setara dengan 88,56% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 408.808.768,- dengan realisasi sebesar Rp. 362.053.507,- setara dengan 88,56%. *Outcome* kegiatan adalah Jumlah PSKS yang aktif.

Faktor pendukung yaitu adanya Sinergitas antar instansi terkait, tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih/ komitmen PSKS, adanya regulasi Bidang Sosial, tersedianya anggaran dan sarana prasarana dan adanya partisipasi masyarakat.

Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya Data PMKS belum valid, terjadinya ego sektoral, keterbatasan SDM Kessos, anggaran dan sarana prasarana.

Solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan verifikasi dan validasi data PMKS, penyiapan dan penguatan SDM Kessos dan anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, dan penguatan PSKS.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 151.263.393,- dan realisasi sebesar Rp. 122.894.657,- atau setara dengan 81,25%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung : adanya tenaga pendamping/SDM program BPNT dan PKH yang terlatih, tersedianya anggaran yang memadai, meningkatnya tingkat pemahaman masyarakat/KPM terkait pemanfaatan bantuan pemerintah

Faktor penghambat : tenaga pendamping/SDM program yang mengundurkan diri karena suatu kepentingan.

Upaya/solusi ke depan: melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kemampuan bagi tenaga pendamping/SDM program.

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 68.911.415,- dan realisasi sebesar Rp. 66.473.500,- atau setara dengan 96,46%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung : adanya veteran/janda veteran, pejuang/janda pejuang penerima uang penghargaan,

Faktor penghambat : berkurangnya jumlah penerima uang penghargaan, masih minimnya anggaran uang melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Upaya/solusi ke depan : melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dengan pembiayaan APBD Kabupaten

- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 97.848.800,- atau setara dengan 97,85%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung : adanya anak usia 17 s.d 45 Tahun sebagai potensi keanggotaan dan pengurus karang taruna.

Faktor penghambat : masih adanya desa/ kelurahan dan kecamatan yang belum memperbaharui kepengurusan karang taruna, kurangnya pemahaman dalam pengelolaan usaha ekonomi produktif oleh karang taruna desa/ kelurahan.

Upaya/solusi ke depan : melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat melalui pelaksanaan bintek bagi pengurus karang taruna desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dengan biaya APBD Kabupaten.

- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 88.633.960,- dan realisasi sebesar Rp. 74.836.550,- atau setara dengan 84,43%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung : meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya konsultasi masalah keluarga ke lembaga-lembaga seperti LK3, tersedianya

anggaran yang memadai.

Faktor penghambat : masih adanya masyarakat yang belum memanfaatkan lembaga untuk konsultasi masalah keluarganya.

Upaya/solusi ke depan: melaksanakan kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dengan pendanaan APBD Kabupaten.

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk pencapaian indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19

Pencapaian Indikator Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	100	97,25	97,25	100	88,31	88,31	-

Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial tahun 2023 sebesar 88,31% dari target 100%. Indikator program ini di dapat dari rumusan jumlah penerima perlindungan dan jaminan sosial yang berasal dari data PBI berjumlah 40.652 dibagi jumlah jiwa dalam DTKS berjumlah 46.032 dikali 100%.

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai berikut : Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial sebesar 88,31%. Alokasi anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 738.336.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 481.414.604,- setara dengan 65,20% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 738.336.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 481.414.604,- setara dengan 65,20%. *Output* kegiatan adalah

data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi. *Outcome* kegiatan adalah data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat.

Faktor pendorong : Sistem informasi (SIKS-NG) yang cukup memadai

Faktor penghambat : masih adanya PSM yang tidak aktif dalam melakukan verifikasi ketidaklayakan dan pemadanan dukcapil, masih adanya petugas pengisi data desa/ kelurahan yang terkendala dalam mengakses sistem SIKS-NG dikarenakan tidak memiliki laptop, belum adanya anggaran dalam peningkatan kapasitas PSM/ Pengisi data Desa/ Kelurahan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 474.336.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 462.351.354,- atau setara dengan 97,35%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota.

Faktor pendorong : Sistem informasi (SIKS-NG) yang cukup memadai

Faktor penghambat : masih adanya PSM yang tidak aktif dalam melakukan verifikasi ketidaklayakan dan pemadanan dukcapil, masih adanya petugas pengisi data desa/ kelurahan yang terkendala dalam mengakses sistem SIKS-NG dikarenakan tidak memiliki laptop, belum adanya anggaran dalam peningkatan kapasitas PSM/ Pengisi data Desa/ Kelurahan.

Upaya/ Solusi ke depan : perlunya dilakukan verval penerima bantuan agar penerima bantuan baik BPNT, PKH benar-mebar masyarakat yang layak dan masyarakat yang tidak layak bisa dikeluarkan dari bantuannya.

- b. Sub Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 263.398.212,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.063.250,- atau setara dengan 7,24%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja dan realisasi anggaran kurang dari 80% dikarenakan program ini merupakan program inovasi baru sehingga belum tersosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Pada tahun 2023 sudah masuk beberapa proposal usulan. Akan tetapi, tidak semua usulan proposal yang masuk disetujui karena tidak memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Bupati

Belitung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Faktor pendorong :

- Masih adanya masyarakat yang belum atau tidak ter-cover bantuan atau program pemerintah daerah.
- Masih ditemukan masyarakat yang memerlukan bantuan.
- Terkait dengan bantuan sosial kepada individu, factor pendorongnya yaitu sudah adanya data calon penerima hasil verifikasi desa/ kelurahan terkait Desa P3KE yang ditetapkan.

Faktor penghambat :

- Belum tersosialisasikannya Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada masyarakat secara menyeluruh
- Proposal usulan bantuan yang disampaikan masyarakat tidak memenuhi kriteria.
- Belum adanya payung hukum untuk pencairan bantuan kepada calon penerima data P3KE, waktu untuk pelaksanaannya tidak memungkinkan lagi.
- Upaya/ solusi ke depan : Mensosialisasikan Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga kepada tingkat Tingkat Pemerintahan Desa/ Kelurahan.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Taman Makam Pahlawan yang tertata.

Untuk pencapaian indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Pencapaian Indikator Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang Tertata	100	100	100	100	100	100	-

Taman Makam Pahlawan yang tertata tahun 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100%. Persentase ini juga merupakan indikator program pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Program ini didapatkan dari rumus jumlah Taman Makam Pahlawan yang tertata yaitu 1 TMP yang terletak di Desa Perawas dengan nama Taman Makam Pahlawan Ksatria Tumbang Ganti.

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebagai berikut : Taman Makam Pahlawan yang terata sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp. 86.975.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 82.405.000,- setara dengan 94,75% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 86.975.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 82.405.000,- setara dengan 94,75%. *Output* kegiatan adalah telaksananya pengelolaan taman makam pahlawan. *Outcome* kegiatan adalah terpeliharanya taman makam pahlawan. penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan.

Faktor pendukung : Terdapatnya Taman Makam Pahlawan,

Faktor penghambat : masih kurangnya SDM yang mengelola Taman Makam Pahlawan, masih minimnya anggaran pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 86.975.400,-

dengan realisasi sebesar Rp. 82.405.000,- setara dengan 94,75%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung : Terdapatnya Taman Makam Pahlawan,

Faktor penghambat : masih kurangnya SDM yang mengelola Taman Makam Pahlawan, masih minimnya anggaran pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Upaya/ solusi ke depan : melaksanakan kegiatan pemeliharaan TMP berupa pengecatan pagar keliling TMP dan pemeliharaan bangunan rumah petugas jaga dan rumah/ Gudang peralatan/ perlengkapan.

6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Program Penunjang yang mendukung Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah :

- Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah dengan target 100%
- Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah dengan target 75%
- Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah dengan target 100%.
- Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur dengan target 100%

Untuk pencapaian indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21

Pencapaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	-

Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75	78,70	104,93	75	78,70	104,93	
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	100	100	100	

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan dan informasi kinerja perangkat daerah tahun 2023 sebesar 100 persen. Indikaor ini merupakan program rutin sekretariat. Yang mencakup tersedianya dokumen-dokumen perencanaan, pelaporan maupun dokumen keuangan lainnya.
2. Indeks profesionalitas ASN perangkat daerah tahun 2023 sebesar 78,70% lebih besar daru target 75%. Indeks ASN ini diperoleh dari perhitungan oleh BKPSDM daerah yang bekerja sama dengan OPD.
3. Persetase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah tahun 2023 sebesar 100%. Merupakan program rutin sekretariat yang berupa administrasi dan pelayanan umum kantor.
4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur tahun 2023 sebesar 100%. Merupakan program rutin sekretariat yang berupa pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, serta pemeliharaan Barang Milik Daerah OPD DSPPPA.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 7.869.294.732,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.366.615.043,- setara dengan 93,61% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evalasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.999.818,- dan realisasi

sebesar Rp. 4.696.400,- atau setara dengan 78,28%. *Output* kegiatan adalah Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.000.000,- atau setara dengan 100%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.999.818,- dan realisasi sebesar Rp. 1.696.400,- atau setara dengan 56,55%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Realisasi keuangan kurang dari 80 persen. Direalisasikan sesuai kebutuhan. Terdapat anggaran rapat tidak terealisasi, dikarenakan rapat evaluasi sudah tergabung dalam rapat rutin bulanan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

(2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.713.920.681,- dan realisasi sebesar Rp. 4.513.577.903,- atau setara dengan 95,75%. *Output* kegiatan adalah dokumen keuangan perangkat daerah. *Outcome* kegiatan adalah terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan. Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.710.920.863,- dan realisasi sebesar Rp. 4.511.881.503,- atau setara dengan 95,77%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

b. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.999.818,- dan realisasi sebesar Rp. 1.696.400,- atau setara dengan 56,55%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

Realisasi anggaran kurang dari 80 persen. Direalisasikan sesuai kebutuhan. Terdapat anggaran rapat tidak terealisasi, dikarenakan rapat evaluasi sudah tergabung dalam rapat rutin bulanan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

(3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 284.286.102,- dan realisasi sebesar Rp. 261.677.550,- atau setara dengan 92,04%. *Output* kegiatan adalah terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah *Outcome* kegiatan adalah Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.966.000,- atau setara dengan 99,51%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 52.747.200,- dan realisasi sebesar Rp. 52.433.300,- atau setara dengan 99,40%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.961.000,- atau setara dengan 99,72%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.105.100,- dan realisasi sebesar Rp. 93.838.800,- atau setara dengan 92,81%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.700.000,- dan realisasi sebesar Rp. 25.788.300,- atau setara dengan 63,36%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan.

Realisasi keuangan kurang dari 80% dikarenakan terdapatnya kelebihan anggaran pengadaan spanduk, bendera dan umbul-umbul dan anggaran tersebut tidak dapat dialihkan ke anggaran lain.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.760.000,- dan realisasi sebesar Rp. 5.760.000,- atau setara dengan 100,00%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 62.973.802,- dan realisasi sebesar Rp. 62.920.150,- atau setara dengan 99,91%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- (4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.429.358.400,- dan realisasi sebesar Rp. 2.223.962.400,- atau setara dengan 91,55%. *Output* kegiatan adalah Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 30.810.000,- atau setara dengan 99,39%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai/ pegawai pensiun di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.398.358.400,- dan realisasi sebesar Rp. 2.193.152.400,- atau setara dengan 90,28%.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai/ pegawai pensiun di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- (5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 226.034.809,- dan realisasi sebesar Rp. 220.915.780,- atau setara dengan 97,74%. *Output* kegiatan adalah pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. *Outcome* kegiatan adalah persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 660.000,- atau setara dengan 22,00%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa

surat menyurat. Realisasi kurang dari 80% dimana, hanya direalisasikan sesuai dengan pengiriman surat dan jasa surat yang lain menggunakan media elektronik. Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 56.951.809,- dan realisasi sebesar Rp. 54.364.780,- atau setara dengan 95,46%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 166.083.000,- dan realisasi sebesar Rp. 165.891.000,- atau setara dengan 99,88%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- (6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 209.694.922,- dan realisasi sebesar Rp. 141.795.010,- atau setara dengan 67,62%. *Output* kegiatan

adalah barang milik daerah dalam kondisi baik. *Outcome* kegiatan adalah persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 46.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 27.308.500,- atau setara dengan 59,37%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya. Sub Kegiatan ini realisasi kurang dari 80%, dimana Terdapat satu unit pemeliharaan kendaraan dinas jabatan yang tidak direalisasikan, dikarenakan adanya pemisahan anggaran kendaraan dinas jabatan dari kendaraan operasional lapangan.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 119.655.000,- dan realisasi sebesar Rp. 78.062.920,- atau setara dengan 65,24%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.

Sub Kegiatan ini realisasi kurang dari 80%, dimana Belanja suku cadang untuk kendaraan penanggulangan bencana (TAGANA) sebagian direalisasikan, mengingat operasionalnya sangat terbatas.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya

sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 0,- atau setara dengan 0%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah mebel yang dipelihara. Realisasi Sub Kegiatan ini dibawah 80%, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, sebab ketersediaan/ kurangnya alat kantor dan rumah tangga/ mebel.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.040.000,- dan realisasi sebesar Rp. 17.500.000,- atau setara dengan 83,17%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.999.922,- dan /realisasi sebesar Rp. 18.923.590,- atau setara dengan 94,62%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/ direhabilitasi.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran. Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai.

Tujuan / Sasaran strategis 2

Tujuan 2 : Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan

Tujuan Strategis 2 Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas hidup perempuan dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Berkeadilan untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan.

Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja:

1. **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**, target pada tahun 2023 adalah 47 di Kabupaten Belitung
2. **Prevalensi kekerasan terhadap perempuan**, target pada tahun 2023 adalah 5,1 di Kabupaten Belitung.

Hasil evaluasi capaian tujuan 2 dan sasaran 2, dengan 2 (dua) indikator kinerja tahun 2022 diperoleh rata-rata nilai capaian 108,50% dan termasuk kategori baik.

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tujuan : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	46,35	53,42	47	53,42 (masih gunakan data 2022, belum rilis BPS)	113,66	113,66
2	Sasaran : Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,3	3,28	5,1	5,25	61,89 (Indikator Negatif)	102,94 (Indikator negatif)
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran						87,78	108,30

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 2 Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan dan Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas hidup perempuan adalah sebesar 108,30% dengan Rata-rata capaian kategori baik, karena terdapat satu indikator negative yang melebihi target yang ditetapkan yaitu pencapaian 5,25 dari target 5,1.

Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini
Dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2022	2023		
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		53,42	53,42	-	Data 2023 memakai data 2022, (Data belum rilis dari kementerian / BPS)
2.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan		3,28	5,25	1,97	Indikator Negatif

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.24 Pencapaian Tujuan/ Sasaran
IDG dan Prevalensi kekerasan terhadap perempuan

No.	Indikator Kinerja	Realiasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 2022 terhadap target akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	53,42	47	53,42	113,66	47,00	113,66
2.	Prevalensi kekerasan terhadap Perempuan	3.28	5,1	5,25	102,94 (Indikator negatif)	5,10	102,94

Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan untuk setiap indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

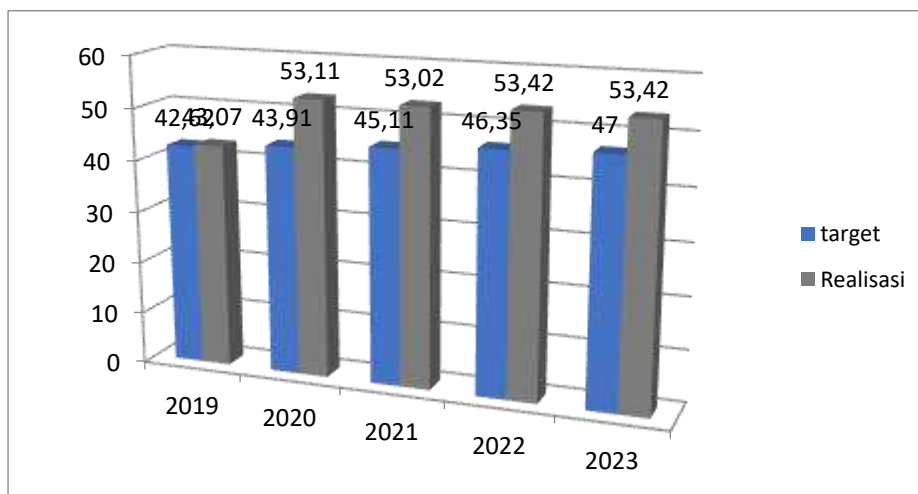
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 datanya belum tersedia baik di BPS maupun di Provinsi, untuk nilai tersebut tahun 2023 masih mengambil data IDG tahun sebelumnya yaitu 53,42. IDG ini diperoleh dari rumusan Persentase perempuan di parlemen, pegawai, pegawai senior, manajer dan pekerja profesional dan teknis, yang datanya bersumber di BPS dan Profil Data Gender. Untuk tahun 2023, IDG masih sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan data belum rilis dari Badan Pusat Statistik.

Faktor yang mendukung capaian kinerja antara lain sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran. Faktor penghambat capaian kinerja adalah kurangnya sumber daya manusia serta adanya mutasi pegawai di tengah tahun anggaran.

Untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka selain sumber daya manusia yang baik juga anggaran dan pelatihan atau bimtek untuk pegawai, serta perlunya koordinasi dengan BPS ataupun DP3ACSKB Provisi Kepulauan Bangka Belitung.

Indikator ini merupakan indikator Tujuan yang kedua yaitu Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan.

Capaian kinerja selama lima tahun dari indikator ini dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :



Grafik 3.3. IDG Tahun 2019, 2020,2021, 2022 dan 2023

Dapat disimpulkan bahwa untuk indikator tujuan/sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 masih sama dengan tahun sebelumnya, dikarenakan indikator IDG data 2023 belum muncul dari Badan Pusat Statistik.

Untuk mencapai tujuan ini, maka didukung oleh sasaran Meningkatkan kualitas hidup perempuan.

2) Prevalensi kekerasan terhadap perempuan

Untuk mengukur kualitas hidup perempuan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak digunakanlah indikator Prevalensi kekerasan terhadap perempuan.

Pada indikator ini menggambarkan tentang rasio korban kekerasan perempuan yaitu dihitung dari Jumlah kekerasan perempuan dibagi dengan jumlah penduduk perempuan > 18 tahun dikali 10.000. Nilai capaian indikator prevalensi ini mengalami peningkatan namun masih di bawah target (indikator negatif).

Tabel 3.25

Rasio perempuan korban kekerasan terhadap perempuan tahun 2023

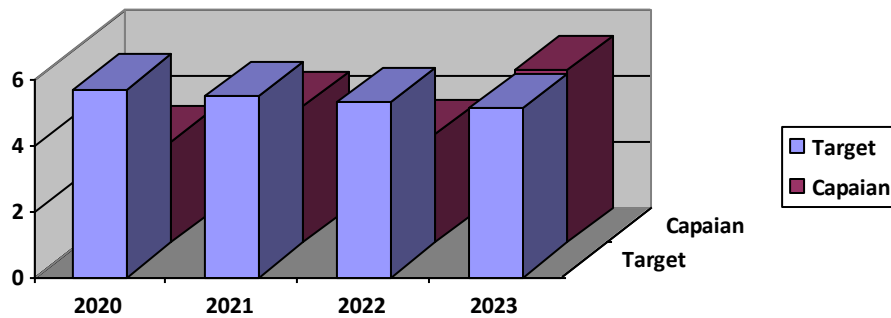
Tahun	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Penduduk Perempuan >18 tahun	Capaian dikali 10.000	Target Capaian
2020	27	87.296	3,09	5,7
2021	37	89.476	4,13	5,5
2022	30	91.366	3,28	5,3
2023	49	93.404	5,25	5,1

Pada tabel di atas dapat prevalensi kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 sebesar 5,25 lebih besar dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 5,1 dan ini merupakan indikator negatif. Pencapaian Angka kekerasan di Kabupaten Belitung Tahun 2022 dan 2023 masih diambang batas target. Prevalensi ini didapat dari rasio perempuan korban kekerasan dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 10000. Jumlah perempuan korban kekerasan tahun 2023 adalah 49 orang, meningkat dari tahun 2022 yang berjumlah 30 orang.

Prevalensi juga dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.4

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan tahun 2020 – 2023



Dari grafik di atas, prevalensi kekerasan terhadap perempuan cenderung di bawah target capaian, dan tahun 2023 baru melonjak di atas target capaian, dapat dilihat pada tabel di atas jumlah kasus yang meningkat di tiap tahunnya. Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mencatat sebanyak 49 kasus perempuan (terdiri dari 11 anak perempuan dan 38 perempuan dewasa) yang mengalami kekerasan dan mendapatkan layanan pada Lembaga layanan perlindungan perempuan. Sedangkan jumlah anak perempuan yang mengalami kekerasan sebanyak 11 orang. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 20% dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan didominasi oleh kekerasan fisik dan psikis. Sedangkan kasus kekerasan seksual juga bahkan dialami oleh perempuan dewasa. Pada kasus kekerasan pada anak perempuan didominasi oleh kekerasan seksual.

Data kasus yang dihimpun dari seluruh Lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak antara lain UPT PPA Kab. Belitung, Unit PPA Polres Belitung, SATGAS PPA, P2TP2A dengan menyediakan layanan yang dibutuhkan antara lain bantuan hukum, layanan psikologis, layanan medis, dan lain-lain.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Pemutakhitan data dan informasi gender;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait;
- 3) Peningkatan kemampuan kompetensi Pegawai melalui diklat/pelatihan.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung/disebabkan antara lain oleh :

1) Adanya sumber anggaran yang memadai

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan :

- 1) Meningkatkan SDM Pelayanan;
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta kebijakan/ peraturan;
- 3) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat/ pelatihan sesuai dengan tupoksinya;
- 4) Meningkatkan koordinasi kepada OPD terkait.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut :

	
	
<p>Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung (Bpk. Kasimin, S.IP., MAB) mewakili Pemerintah Kabupaten Belitung menerima Penghargaan APE Kategori Pratama di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI.</p>	



Zoom Meeting Malam Penganugerahan APE



Rapat Koordinasi Kelompok Kerja PUG Kabupaten Belitung



Rapat Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Kab. Belitung



Pelatihan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Kabupaten Belitung



Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Politik di Kabupaten Belitung

	
<p>Peningkatan Kapasitas Perempuan Bidang Politik di Kabupaten Belitung</p>	<p>Rangkaian Kegiatan PHI ke-95 dan HUT GOW ke-59 di Halaman Gedung Nasional</p>
	
<p>Rangkaian Kegiatan PHI ke-95 dan HUT GOW ke-59 (Lomba Senam Bedincak) di Gedung Nasional</p>	<p>Rangkaian Kegiatan PHI ke-95 dan HUT GOW ke-59 (Lomba Kepengurusan Jenazah Perempuan)</p>
	
<p>Puncak Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-95 dan HUT GOW ke-59 Kabupaten Belitung di Gedung Serba Guna</p>	

Gambar 3.2. Dokumentasi foto kegiatan yang mendukung capaian Tujuan dan Sasaran Kedua

Capaian Tujuan/Sasaran 2, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota

Indikator program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Untuk pencapaian indikator ini pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26
Pencapaian Indikator Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,5	42,40	8480	0,5	48,48	9696	-

Capaian indikator kinerja Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2023 yaitu 48,48% diatas target sebesar 0,5%. Nilai diperoleh dari rumusan jumlah anggaran yang responsive gender seluruh Perangkat Daerah Rp. 536.418.495.812,- dibagi jumlah anggaran Belanja operasional dan belanja modal APBD 1.121.982.188.359,- dikali 100%. Jika dibandingkan dengan target, persentase realisasi pencapaian indikator ini meningkat sebesar 6,08% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase ARG (Anggaran Responsive Gender) meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan dampak dari dilaksanakan Bimtek PPRG pada Bulan Oktober tahun 2023 dengan narasumber dari Kementerian PPA yang pesertanya adalah Perencana

OPD, baru dipahami kegiatan/ sub kegiatan yang termasuk ARG pada Anggaran masing-masing Perangkat Daerah. Semua kegiatan yang tidak memihak salah satu jenis kelamin adalah ARG. Dimana pada tahun-tahun sebelumnya ARG pada Perangkat Daerah banyak yang nihil karena ketidakpahaman mana ARG dan non ARG.

Alokasi anggaran Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebesar Rp. 509.312.773,- dengan realisasi sebesar Rp. 517.180.698,- setara dengan 99,32% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.547.070,- dan realisasi sebesar Rp. 30.192.917,- atau setara dengan 87,40%. *Output* kegiatan adalah Lembaga Pemerintahan Daerah yang melaksanakan kebijakan PUG. *Outcome* kegiatan adalah Terlaksananya kebijakan PUG.

Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Upaya/ solusi ke depan :

- Peningkatan kompetensi SDM yang membidangi PUG PP.
- Penambahan SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.
- Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) / Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Pemberdayaan Perempuan (PP).
- Meningkatkan forum Driver PUG, Pokja PUG untuk meningkatkan ARG pada seluruh OPD.
- Menyusun Perda tentang PUG pada tahun 2024.
- Meningkatkan kapasitas Tim Penggerak/ Driver PUG dan Pokja PUG.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.758.590,- dan realisasi sebesar Rp. 17.095.037,- atau setara dengan 91,13%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

- b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.788.480,- dan realisasi sebesar Rp. 13.097.880,- atau setara dengan 82,96%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

- (2) Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 468.340620,- dan realisasi sebesar Rp 465.143.706,- atau setara dengan 99,32%. *Output* kegiatan adalah Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Terfasilitasinya organisasi perempuan. *Outcome* kegiatan yaitu meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.684.400,- dan realisasi sebesar Rp. 16.675.150,- atau setara dengan 93,73%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Upaya ke depan adalah penambahan SDM yang kompetensi di Bidang PUG PP.

- b. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.656.220,- dan realisasi sebesar Rp. 448.568.556,- atau setara dengan 99,54%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang

sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Upaya ke depan adalah menambah SDM yang kompeten di Bidang PUG PP, Bimtek peningkatan partisipasi perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, meningkatkan kompetensi SDM Pengurus Organisasi Perempuan/Wanita, diklat/ bimtek manajemen organisasi dan kepemimpinan pada Organisasi Wanita.

- (3) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.293.008,- dan realisasi sebesar Rp 13.976.150,- atau setara dengan 97,78%. *Output* kegiatan adalah Terfasilitasinya forum puspa Kabupaten Belitung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan anak.

Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 14.293.008,- dan realisasi sebesar Rp 13.976.150,- atau setara dengan 97,78%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan.

Capaian indikator tersebut didukung oleh kegiatan ini melalui pemberdayaan

Pokja PUG dan PPRG, Pembinaan Organisasi Perempuan, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing dengan laki-laki dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik, ikut membantu perekonomian keluarga, mau mengembangkan diri dan terpacu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Faktor penghambat yaitu anggaran yang masih terbatas, kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Upaya kedepan yaitu penambahan SDM yang kompeten di Bidang PUG PP, Peningkatan kapasitas SDM PUSPA, menambah anggaran untuk sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.

2. Program Perlindungan Perempuan

Indikator program Perlindungan Perempuan adalah persentase layanan perlindungan perempuan.

Untuk pencapaian indikator program perlindungan perempuan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27

Pencapaian Indikator Program Perlindungan Perempuan Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Perlindungan Perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	100	100	100	100	100	100	-

Persentase layanan perlindungan perempuan tahun 2023 yaitu 100%. Indikator ini didapatkan dari rumusan jumlah korban kekerasan perempuan yang melapor 49 orang sama dengan jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan dikali 100%. Jumlah kasus kekerasan perempuan yang melapor meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu sebanyak 30 kasus perempuan.

Pravelensi kekerasan menurun menunjukkan bahwa upaya pencegahan memiliki dampak kepada kasus kekerasan terhadap perempuan. Namun angka pravelensi

kekerasan sendiri dapat berarti bahwa jumlah kasus yang ditangani belum menunjukkan jumlah kasus kekerasan sesungguhnya. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya kasus terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es. Jumlah kasus yang diterima seluruhnya dilayani dan ditangani oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak. Adapun layanan yang diberikan yaitu bantuan hukum, layanan psikis, medis dan lain-lain. Data yang dihimpun dari seluruh lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Belitung.

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan Perempuan sebagai berikut : Persentase layanan perlindungan perempuan sebesar 100%. Alokasi anggaran Program Perlindungan Perempuan adalah sebesar Rp. 103.865.803,- dengan realisasi sebesar Rp. 89.449.911,- setara dengan 86,12% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.865.803,- dengan realisasi sebesar Rp. 89.449.911,- setara dengan 86,12%. *Output* kegiatan adalah jumlah lembaga yang terfasilitasi. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan perlindungan perempuan.

Faktor pendukung yaitu adanya komitmen, relasi, dari para pihak dan dari lembaga jejaring yang bekerjasama, serta hubungan baik yang dijalin untuk membantu pelaksanaan.

Faktor penghambat yaitu Kurangnya ketersediaan SDM yang memiliki kapabilitas sebagai pelaksana pelayanan yang terlatih. Dan terbatasnya dan terpangkasnya sumber dana anggaran diakibatkan dampak dari pandemic, yang menyebabkan terbatasnya ruang lingkup kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 103.865.803,- dengan realisasi sebesar Rp. 89.449.911,- setara dengan 86,12%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan.

Faktor Pendukung antara lain adalah :

- ketersediaan anggaran dalam pelayanan penanganan kasus.

- Koordinasi antar lembaga cukup baik dalam pelayanan penanganan kasus.

Faktor Penghambat yaitu :

- Kurangnya sumber daya manusia.

Upaya / solusi ke depan yaitu untuk dapat tercapainya kinerja yang baik maka anggaran layanan penanganan dapat menggunakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dan pelatihan serta bimtek juga akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Indikator Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).

Untuk pencapaian indikator program pengelolaan sistem data gender dan anak pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Pencapaian Indikator Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase pemenuhan data sistem informasi gender dan anak (SIGA)	25	55,80	223,20	25	75	300	-

Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) tahun 2023 sebesar 75% lebih besar dari target yang ditetapkan tahun 2023 yaitu 25%. Capaian indikator ini didapat dari Komponen data gender dan anak yang terpenuhi dibagi jumlah komponen data SIGA dikali 100%. Dari 60 komponen data SIGA baru 45 komponen yang terpenuhi atau sekitar 75% Faktor penghambat, adanya OPD yang belum memahami tentang pentingnya data gender dan anak, sehingga diperlukan Bimtek atau pelatihan-pelatihan khusus mengenai Pemenuhan Sistem Informasi Gender dan Anak.

Capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebagai berikut : Persentase pemenuhan data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) sebesar 75%. Alokasi anggaran Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah sebesar Rp. 42.703.164,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.600.300,- setara dengan 99,76% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 42.703.164,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.600.300,- setara dengan 99,76%. *Output* kegiatan adalah tersedianya data gender dan anak . *Outcome* kegiatan adalah data terpilah dan informasi gender yang akurat. Capaian indikator tersebut didukung melalui koordinasi permintaan data sesuai dengan aplikasi SIGA ke seluruh OPD, Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Belitung untuk pengumpulan, pengolahan, analisis dan menyajikan data dengan penyusunan Buku Profil Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Belitung. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. Rp. 42.703.164,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.600.300,- setara dengan 99,76%. *Output* sub kegiatan adalah jumlah dokumen data gender dan anak Kabupaten/ Kota yang tersedia.

Capaian indikator tersebut didukung melalui koordinasi permintaan data sesuai dengan aplikasi SIGA ke seluruh OPD, Desa/ Kelurahan se-Kabupaten Belitung untuk pengumpulan, pengolahan, analisis dan menyajikan data dengan penyusunan Buku Profil Data Terpilah Gender dan Anak Kabupaten Belitung. Faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang kompeten di Bidang PUG PP.

Upaya kedepan yaitu menambah SDM yang kompeten di Bidang PUG PP, melakukan koordinasi dengan OPD terkait dan memperkuat jejaring data gender dan anak.

Tujuan/Sasaran strategis 3

Tujuan 3 : Terpenuhi Hak Anak

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas hidup anak

Tujuan Strategis 3 Terpenuhi Hak Anak; Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas hidup anak dibuat dalam rangka mewujudkan Indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Belitung pada misi ke-1 Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat Yang Berkeadilan. Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan. Hal-hal tersebut oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung diupayakan pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator kinerja:

1. **Kabupaten Layak Anak (KLA)**, yang targetnya pada tahun 2023 adalah Pratama 85% di Kabupaten Belitung
2. **Prevalensi kekerasan terhadap anak**, pada tahun 2023 ditargetkan 4,4 di Kabupaten Belitung

Hasil evaluasi capaian tujuan 3 dan sasaran 3, dengan 2 (dua) indikator kinerja diperoleh rata-rata nilai capaian 144,03% dan termasuk kategori Baik (terdapat indikator negatif).

Tabel 3.29

Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Satuan	Tahun 2022		Tahun 2023		Capaian Kinerja 2022	Capaian Kinerja 2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Tujuan : Terpenuhi Hak Anak	83	58,15	Pratama (85%)	Madya	70,06	117,84
2	Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup anak	4,6	9,50	4,4	12,97 (Indikator negative)	206,52	294,77
Rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran						56,40	206,31

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian atau rata-rata kinerja tujuan strategis 3 Terpenuhinya hak anak dan Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kualitas hidup anak tahun 2023 adalah sebesar 144,03%. Untuk capaian indikator Kabupaten Layak anak tahun 2023 dilaksanakan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan memperoleh predikat Madya. Capaian kinerja berdasarkan perbandingan capaian tahun ini dan capaian tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Berdasarkan Perbandingan Capaian Tahun ini dengan Capaian Tahun Lalu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Selisih Realisasi	Ket
			2022	2023		
1	Kabupaten Layak Anak (KLA)	%	70,06	117,84	47,74	
2	Prevalensi kekerasan terhadap anak		9,50	12,97	3,47	Indikator negatif

Sementara untuk capaian kinerja tahun 2023 terhadap target akhir Renstra sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.31
Pencapaian Tujuan/ Sasaran KLA dan Prevalensi Kekerasan terhadap anak

No.	Indikator Kinerja	Realiasi 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian 2022 terhadap target akhir Renstra 2023
			Target	Realisasi	Capaian dalam %		
1	Kabupaten Layak Anak (KLA)	70,06	Pratama (85%)	Madya (600 – 700)	117,84	85	117,84
2	Prevalensi kekerasan terhadap anak	9,50	4,4	12,97	294,77	4,40	294,77

Dari tabel di atas dapat dilihat untuk setiap indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

1) Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kebijakan KLA sudah dimulai sejak tahun 2006. Sementara, pada Tahun 2019, Kabupaten Belitung meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat pratama dengan skor perolehan Penilaian Mandiri sebesar 609, 93. Dan di tahun 2023 KLA Kabupaten Belitung meraih predikat tingkat Madya.

Pengembangan KLA di setiap Kabupaten/Kota harus mengacu pada 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang secara garis besar tercermin dalam 5 kluster hak anak, yakni

- (1) Hak sipil dan kebebasan;
- (2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- (4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- (5) Perlindungan khusus bagi 15 kategori anak.

Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk tahun 2022 sama dengan tahun 2021 yaitu Predikat Pratama. Skor Capaian KLA dari Kementerian PPA RI tahun 2021 yaitu 583,7 point dan tahun 2022 yaitu 581,52 point. Tingkat KLA berdasarkan Evaluasi KLA adalah KLA Tingkat Pratama (nilai 500 – 600), KLA Tingkat Madya (nilai 601 – 700), dan KLA Tingkat Nindya (nilai 701 – 800). Faktor pendorong KLA antara lain adalah meningkatnya sumber daya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja stakeholder terkait dalam indikator KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan andil bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di kabupaten Belitung dalam mewujudkan KLA.

Kendala yang ditemui pada upaya Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada 5 kluster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

Solusi kedepan antara lain adalah :

1. Pemerintah perlu mendorong peranan forum anak agar aktif menyuarakan aspirasi anak.

2. Meningkatkan jumlah fasilitas informasi layak anak.
3. Diharapkan agar masyarakat lebih menyadari pentingnya pemenuhan hak anak dan ikut berpartisipasi secara aktif
4. Pemerintah perlu membuat sistem pengelolaan data secara khusus untuk mengintegrasikan data anak.
5. Pemerintah perlu mengikutsertakan kepentingan anak pada proses pembangunan

Dalam mengatasi masalah yang menjadi faktor penghambat antara lain adalah:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia para pelaksana
- b. Meningkatkan anggaran dalam pemenuhan hak anak khususnya berbagai fasilitas yang ramah dan layak bagi anak
- c. Penguatan komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan
- d. Memperbaiki kualitas komunikasi antar pelaksana kebijakan agar seluruh program dan kegiatan dapat terkoordinir dengan baik.
- e. Meningkatkan kapasitas anggaran desa demi mewujudkan desa/kelurahan layak anak.

2) Prevalensi kekerasan terhadap anak

Indikator Prevalensi Kekerasan terhadap anak didapat dari rumusan rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus. Untuk tahun 2023 dengan nilai sebesar 12,97 yaitu anak yang memerlukan perlindungan khusus berjumlah 74 orang (terdiri dari 13 anak korban kekerasan, 57 anak dengan disabilitas, dan 4 anak yang berhadapan dengan hukum), meningkat dibanding tahun 2022 berjumlah 50 orang.

Pada indikator ini menggambarkan tentang rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus yaitu dihitung dari Jumlah anak yang memerlukan perlindungan (anak korban kekerasan, anak dengan disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum) dibagi dengan jumlah penduduk anak dikali 10.000. Nilai capaian indikator prevalensi ini mengalami peningkatan dan di atas target (indikator negatif). Jumlah korban kekerasan anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.32

Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus tahun 2023

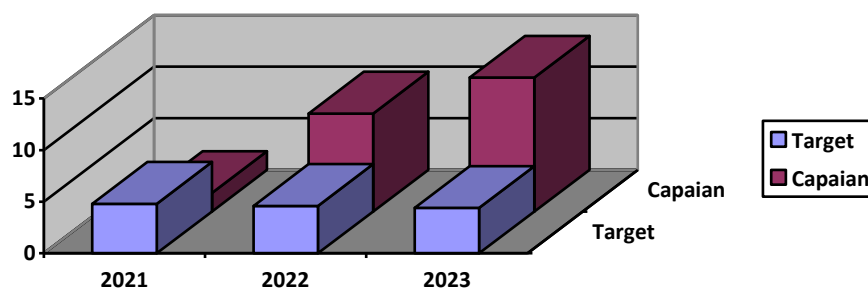
Tahun	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan (anak korban kekerasan, anak dengan disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum)	Jumlah Penduduk Anak	Capaian dikali 10.000	Target Capaian
2021	10	55.283	1,81	4,8
2022	50	52.661	9,5	4,6
2023	74	57.042	12,97	4,4

Pada tabel di atas dapat prevalensi kekerasan terhadap perempuan tahun 2023 sebesar 12,97 lebih besar dari target yang ditetapkan tahun 2023 sebesar 4,4 dan ini merupakan indikator negatif. Pencapaian Angka kekerasan di Kabupaten Belitung Tahun 2022 dan 2023 di atas target dengan indikator negatif.

Prevalensi juga dapat digambarkan dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.5

Prevalensi kekerasan terhadap anak tahun 2020 – 2023



Dari grafik di atas, prevalensi kekerasan terhadap anak dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan dan di atas target negatif.

Tahun 2023, Dinas Sosial Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung mencatat sebanyak 74 orang anak yang mendapatkan perlindungan (13 kasus anak yang mengalami kekerasan, 57 anak dengan disabilitas, dan 4 anak yang berhadapan dengan hukum) dan mendapatkan layanan pada Lembaga layanan perlindungan anak. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 3,47% dari tahun sebelumnya. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan didominasi oleh kekerasan fisik dan psikis juga terdapat kasus kekerasan seksual pada anak. Data kasus yang dihimpun dari seluruh Lembaga

layanan perlindungan perempuan dan anak antara lain UPT PPA Kab. Belitung, Unit PPA Polres Belitung, SATGAS PPA, P2TP2A dengan menyediakan layanan yang dibutuhkan antara lain bantuan hukum, layanan psikologis, layanan medis, dan lain-lain.

Jumlah anak korban kekerasan mengalami kenaikan di tahun 2022 dan Kembali menurun di tahun 2023. Hal ini menjadi catatan bahwa upaya untuk pencegahan anak menjadi korban kekerasan perlu ditingkatkan. Layanan terhadap anak-anak dengan perlindungan terus dilakukan dan upaya-upaya terhadap pencegahan juga terus dilakukan. Adapun indikator pravelensi perlindungan anak adalah anak dengan masalah hukum, anak disabilitas, anak dengan HIV/AIDS dan lain-lain.

Faktor pendukung daripada layanan penanganan kasus antara lain adalah semakin meningkatnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak serta tugas dan fungsi dari lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak. Hambatan yang dialami antara lain adalah kurangnya SDM yang memiliki kapasitas dalam pelayanan penanganan kasus, koordinasi yang belum sinergis antara lembaga layanan dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti tersedianya UPTD PPA sebagai pemangku pelaksana layanan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu permasalahan pada ranah domestik juga sering mendapat hambatan karena masyarakat cenderung sering menutupi karena merasa bahwa permasalahan ini adalah aib.

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut diatas antara lain yaitu :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait;
- 2) Komitmen dan Sinergitas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Media Massa, dan instansi terkait pemenuhan hak anak.

Capaian kinerja yang cukup tinggi melampaui target didukung/disebabkan antara lain oleh :

- 1) Adanya sumber anggaran yang memadai.
- 2) Data yang belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan/ kebijakan terkait dengan pemenuhan hak anak.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tahun 2023 atau untuk memperbaiki kinerja di tahun 2024 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan melakukan :

- 1) Meningkatkan SDM Pelayanan;
- 2) Menambah sarana dan prasarana serta kebijakan/ peraturan;
- 3) Meningkatkan kompetensi pegawai melalui diklat/ pelatihan sesuai dengan tupoksinya;
- 4) Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada Stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan Kabupaten Layak Anak.

Beberapa dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sebagai berikut :

 <p>Penganugerahan KLA 2023 KATEGORI MADYA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">KABUPATEN BATANGHARI <li style="width: 50%;">KOTA MATARAM <li style="width: 50%;">KOTA SUNGAI PENUH <li style="width: 50%;">KABUPATEN DOMPU <li style="width: 50%;">KOTA JAMBI <li style="width: 50%;">KOTA TANJUNGPINANG <li style="width: 50%;">KABUPATEN TEBO <li style="width: 50%;">KABUPATEN BELITUNG <li style="width: 50%;">KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT <li style="width: 50%;">KABUPATEN BELITUNG TIMUR 	 <p>HARI ANAK NASIONAL 2023 Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ANAK TERLUKUNG INDONESIA MAJU</p>
<p>Zom Meeting Malam Penganugerahan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Belitung</p>	<p>Penyerahan Piagam dan Piala KLA Madya pada Acara Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi</p>
	
<p>Kegiatan Hari Anak oleh Forum Anak Kabupaten Belitung di UPT Museum Pemkab Belitung</p>	<p>Sosialisasi Pencegahan Bullying di SMP Negeri 3 Membalong</p>



Peningkatan Kapasitas Satgas PPA dan Kelompok PKDRT Kabupaten Belitung

Gambar 3.3. Dokumentasi foto kegiatan yang mendukung capaian Tujuan dan Sasaran Ketiga

Adapun capaian Tujuan/Sasaran 3 diupayakan dengan program-program, yaitu:

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Indikator Program Pemenuhan Hak Anak adalah Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama.

Indikator ini diperoleh dengan melihat skor penilaian KLA. Dimana untuk tahun 2022 dilaksanakan penilaian mandiri dan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan memperoleh nilai status KLA Pratama dengan skor 581,52. Tahun 2023, Kabupaten Belitung mendapat predikat KLA Tingkat Madya

Realisasi capaian target dari indikator ini adalah sebesar 117,84%.

Untuk pencapaian indikator Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33
Pencapaian Indikator Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Tahun 2023

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	750 Point	581,52 Point	77,54	Pratama (85%)	Madya (skor 601 – 700)	117,84	-

Pada perolehan penilaian KLA tersebut ada beberapa poin penting yang belum dilaksanakan untuk memenuhi indikator pemenuhan hak anak ini, yaitu :

1. Belum tersedia kebijakan terkait dengan Informasi Layak Anak.
2. Belum terbentuk Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak
3. Masih tingginya angka pernikahan anak.
4. Belum tersedia SDM di Lembaga Pemenuhan Hak Anak yang telah mengikuti Pelatihan Konvensi Hak Anak.
5. Belum tersedia Ruang Bermain Ramah Anak yang terstandarisasi dan merata di seluruh desa dan kelurahan.
6. Belum banyak terbentuk kerjasama dari Dunia Usaha dan Media untuk melakukan promosi dan kampanye tentang Pemenuhan hak dan perlindungan anak.
7. Belum banyak tersedia fasilitas untuk anak disabilitas.
8. Belum kuatnya implementasi dari Kawasan Tanpa rokok.
9. Belum optimalnya Pelayanan Kesehatan Ramah Anak yang sesuai dengan standar.
10. Belum tersedianya Rumah Ibadah ramah Anak
11. Belum optimalnya koordinasi antar lintas sektor terkait dengan perlindungan anak.

Strategi yang dilakukan :

1. Memperkuat peran tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA
2. Melaksanakan pelatihan-pelatihan atau Bimtek untuk penguatan SDM di lembaga pemenuhan hak anak.
3. Melakukan kampanye pemenuhan hak dan perlindungannya secara terus menerus kepada masyarakat.

Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama tahun 2022 sama dengan tahun 2021. Faktor pendorong KLA antara lain adalah meningkatnya sumber daya fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang kinerja stakeholder terkait dalam indikator KLA dalam upaya pemenuhan hak anak. Selain itu dukungan masyarakat dan dunia usaha telah memberikan andil bagi pelaksanaan pemenuhan hak anak di kabupaten Belitung dalam mewujudkan KLA. Kendala yang ditemui pada upaya Pemenuhan Hak Anak Kabupaten Belitung dapat dilihat pada 5 kluster hak anak. Berbagai kendala yang ditemui juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menghambat yaitu faktor sumber daya manusia dan sumber daya finansial dan anggaran, komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan, serta faktor komunikasi untuk mensosialisasikan pemenuhan hak anak.

Capaian indikator kinerja Program Pemenuhan Hak Anak sebagai berikut : Status Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama. Alokasi anggaran Program Pemenuhan Hak Anak adalah sebesar Rp. 173.203.252,- dengan realisasi sebesar Rp. 166.490.740,- setara dengan 96,12% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

(1) Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.046.619,- dan realisasi sebesar Rp. 9.720.344,- atau setara dengan 80,69%. *Output* kegiatan adalah tercapainya peningkatan status KLA. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya perlindungan terhadap anak.

Faktor pendukung capaian kinerja yaitu komitmen sinergitas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga masyarakat terkait pemenuhan hak anak.

Faktor penghambat : Data belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan terkait dengan Pemenuhan Hak Anak.

Upaya/ solusi ke depan : Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan KLA.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.046.619,- dan realisasi sebesar Rp. 9.720.344,- atau setara dengan 80,69%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung capaian kinerja yaitu komitmen sinergitas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga masyarakat terkait pemenuhan hak anak.

Faktor penghambat : Data belum terintegrasi, termutakhir, dan dimanfaatkan secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan terkait dengan Pemenuhan Hak Anak.

Upaya/ solusi ke depan : Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan KLA.

(2) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.156.633,- dan realisasi sebesar Rp. 156.770.396,- atau setara dengan 97,28%. *Output* kegiatan adalah terfasilitasinya forum anak kabupaten belitung. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan terhadap anak.

Faktor pendukung capaian kinerja yaitu komitmen sinergitas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga masyarakat terkait pemenuhan hak anak.

Faktor penghambat : Data belum terintegrasi, termutakhir, dan dimanfaatkan secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan terkait dengan Pemenuhan Hak Anak.

Upaya/ solusi ke depan : Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan KLA.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

a. Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 161.156.633,- dan realisasi sebesar Rp. 156.770.396,- atau setara dengan 97,28%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Penguatan

Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung capaian kinerja yaitu komitmen sinergitas seluruh elemen terkait OPD, Lembaga masyarakat terkait pemenuhan hak anak.

Faktor penghambat : Data belum terintegrasi, termutakhir, dan termanfaatkan secara baik dalam penyusunan program/ kegiatan terkait dengan Pemenuhan Hak Anak.

Upaya/ solusi ke depan : Melakukan koordinasi secara berkelanjutan kepada stakeholder dan instansi terkait dalam percepatan pengembangan KLA.

2. Program Perlindungan Khusus Anak

Indikator Program Perlindungan Khusus Anak adalah persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten.

Realisasi capaian target dari indikator ini adalah sebesar 100%

Untuk pencapaian indikator Program Perlindungan Khusus Anak pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.34
Pencapaian Indikator Program Perlindungan Khusus Anak
Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket
		Target %	Realisasi %	% Capaian	Target %	Realisasi %	% Capaian	
Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait	100	100	100	100	100	100	-

Indikator persentase penanganan anak korban kekerasan didapat dari rumusan jumlah anak korban kekerasan/ jumlah anak korban kekerasan yang ditangani x 100%.

Persentase penanganan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten tahun 2023 yaitu 100 persen, dengan jumlah anak korban kekerasan sebanyak 13 orang meningkat dari tahun sebelumnya berjumlah 8 orang. Dan semua

kasus yang masuk pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun lembaga lainnya ditangani 100%.

Jumlah kasus yang diterima seluruhnya dilayani dan ditangani oleh lembaga perlindungan perempuan dan anak. Adapun layanan yang diberikan yaitu bantuan hukum, layanan psikis, medis dan lain-lain. Data yang dihimpun dari seluruh lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak yang ada di Kabupaten Belitung.

Capaian indikator kinerja Program Perlindungan Khusus Anak sebagai berikut :
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten. Alokasi anggaran Program Pemenuhan Hak Anak adalah sebesar Rp. 65.328.034,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.173.448,- setara dengan 99.76% dan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- (1) Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.328.034,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.173.448,- setara dengan 99.76%. *Output* kegiatan adalah tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/ Kelurahan. *Outcome* kegiatan adalah meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/ Kelurahan.

Faktor pendukung :

1. Meningkatnya jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang tersedia di Desa.
2. Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak yang semakin meningkat.

Faktor penghambat anggaran yang terbatas dikarenakan suasana pandemi menyebabkan ruang lingkup kegiatan menjadi terbatas. Dan koordinasi dan keaktifan lembaga PATBM yang masih kurang.

Dilaksanakan melalui Sub Kegiatan berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 65.328.034,- dengan realisasi sebesar Rp. 65.173.448,- setara dengan 99.76%. *Output* sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung :

1. Meningkatnya jumlah lembaga perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yg tersedia di Desa.
2. Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak yang semakin meningkat.

Faktor penghambat anggaran yang terbatas dikarenakan suasana pandemi menyebabkan ruang lingkup kegiatan menjadi terbatas. Dan koordinasi dan keaktifan lembaga PATBM yang masih kurang.

3.2 KINERJA LAINNYA TAHUN 2023

3.2.1. Kinerja Lainnya (Program Inovasi Begalor)

Tradisi *Begalor* dalam bahasa Melayu Belitong berarti bercerita tentang hubungan keluarga atau kekerabatan. Istilah lainnya silaturahmi yang memungkinkan untuk saling mengenal antar sesama anggota kerabat satu dengan anggota kerabat lainnya. Budaya *Begalor* dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik antar sesama.

Begalor dilaksanakan berdasarkan kearifan lokal dengan memanfaatkan berbagai momentum seperti perayaan pernikahan, selamatan, kematian, kelahiran, Idul Fitri, Idul Adha dan lain sebagainya. Momentum perayaan adalah kesempatan paling terbuka untuk berkumpul bersama, bercengkerama, beramah tamah penuh dengan nuansa keakraban dan santai.

Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Begalor* inilah yang menjadi dasar peluncuran Program Inovatif Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitong yang juga mengusung nama yang sama yaitu BEGALOR (Bantuan Sosial Kemanusiaan Kepada Gelandangan, Anak-anak, Lanjut Usia dan Orang terlantar) terinspirasi dari istilah *Begalor* yang dapat dimaknai sebagai hubungan kekerabatan yang hangat serta bentuk kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong terhadap masyarakat yang termarginalkan atau yang dalam istilah Sosial disebut dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Gelandangan, Anak-anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Orang Terlantar.

Program ini akan memberikan Bantuan Sosial Kemanusiaan kepada masyarakat yang memiliki kriteria dan kondisi tertentu sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Penyandang Disabilitas Berat. Sasaran penerima manfaat bantuan telah dilakukan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Dari ketiga sasaran Program tersebut di atas, sebelum dilakukan penetapan penerima manfaat dilakukan verifikasi data calon penerima dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria Lanjut Usia Terlantar Sebagai Penerima Bantuan Kebutuhan Bahan Kebutuhan/Sembako sebanyak 60 (Enam Puluh) Penerima Manfaat.
 - a) Diutamakan bagi Lanjut Usia yang telah berusia diatas 70 tahun keatas, dan Lanjut Usia yang berusia 60 tahun keatas dalam keadaan sakit menahun.
 - b) Hidupnya sangat tergantung pada bantuan orang lain atau hidupnya hanya bisa berbaring ditempat tidur (bed ridden) sehingga tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari.
 - c) Tidak memiliki sumber penghasilan tetap, miskin dan terlantar.
 - d) Indera penglihatan dan pendengaran sudah tidak berfungsi normal.
 - e) Bukan penyandang cacat berat atau seseorang yang menerima bantuan / santunan dari pemerintah / lembaga sosial secara permanen.
 - f) Memiliki KTP / Surat Keterangan domisili dari Kepala Desa / Lurah setempat.
 - g) Apabila berstatus suami istri dan satu rumah dihuni oleh dua orang atau lebih, maka yang memperoleh bingkisan bagi Lanjut Usia adalah salah satu seseorang dari mereka.

2. Kriteria Penerima Bantuan Bahan Kebutuhan/Sembako bagi Penyandang Disabilitas Terlantar dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 30 (Tiga Puluh) Penerima Manfaat.
 - a. Kedisabilitasannya tidak dapat direhabilitasi.
 - b. Tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara sendiri / selalu memerlukan bantuan orang lain.
 - c. Tidak mampu menghidupi diri sendiri dan tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar.
 - d. Tidak diberikan kepada Penerima Manfaat layanan yang sedang mendapatkan pelayanan dalam panti.
 - e. Terdaftar sebagai penduduk setempat.

3. Kriteria Penerima Bantuan Bahan Kebutuhan Yang Akan Diserahkan Kepada Anak Terlantar dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 15 (Lima Belas) Penerima Manfaat.
- Anak terlantar/anak dari keluarga kurang mampu
 - Diutamakan orang tua masuk data BDT
 - Usia 0 – 18 tahun
 - Diutamakan bayi, anak SD dan SMP
 - Apabila dalam suatu keluarga ada yang memiliki lebih dari satu anak usia yang masuk kriteria, maka yang berhak memperoleh bahan kebutuhan yang akan diserahkan kepada Anak Terlantar adalah salah satu seseorang dari anak keluarga tersebut.

Dokumentasi foto-foto Program Begalor :





Penyerahan Bantuan Permakanan kepada Disabilitas Terlantar



Penyerahan Bantuan Permakanan kepada Anak Terlantar

Gambar 3.4. Dokumentasi Program Begalor

3.2.2. Penghargaan/ Apresiasi Instansi Lainnya

1. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Madya

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Belitung menerima penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2023 Kategori Madya dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Inisiatif lain terkait pelaksanaan program yaitu Koordinasi lintas OPD untuk mendukung Program Kota Layak Anak. Membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak-hak anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota.

Keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan program yaitu Penerbitan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Keterlibatan kelompok marginal (perempuan, anak, disabilitas) dalam pelaksanaan program yaitu pelibatan anak-anak dalam program dan mendukung Kabupaten Layak Anak melalui Forum Anak Kabupaten Belitung.



Gambar 3.5. Piagam Penghargaan KLA Kabupaten Belitung



Gambar 3.6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung (Bpk. Kasimin, S.IP., MAB) mewakili Pemerintah Kabupaten Belitung menerima Penghargaan KLA Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI (Diserahkan pada acara Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

2. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tingkat Pratama

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada K/L dan Pemda atas keberhasilan dan Prakarsa dalam pencapaian Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pusat dan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Belitung menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Pratama dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan program yaitu Penerbitan Perbup Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dan Penerbitan Perbup Nomor 188.45/188/KEP/DSPPPA/2018 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Belitung, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris.

Keterlibatan kelompok marginal (perempuan, anak, disabilitas) dalam pelaksanaan program yaitu Gabungan Organisasi Wanita (GOW) dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Belitung.



Gambar 3.7. Piagam Penghargaan APE Kabupaten Belitung



Gambar 3.8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung (Bpk. Kasimin, S.IP., MAB) mewakili Pemerintah Kabupaten Belitung menerima Penghargaan APE Kategori Pratama di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI.

3.2.3. Perbaikan SAKIP pada Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, Nomor : 700.1.2.1/164/RLKin/INSPEK/2023 Tanggal 9 Oktober 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.35.

Hasil Evaluasi oleh Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten Belitung

No	Komponen	Tahun (2021)			Tahun n (2022) Mandiri			Tahun 2022 (Evaluator)		
		Bobot	Capaian	Nilai	Bobot	Capaian	Nilai	Bobot	Capaian	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	83,21	24,96	30	80	24	30	67	20,1
2	Pengukuran Kinerja	25	75	18,75	30	75	22,5	30	51	15,3
3	Pelaporan Kinerja	15	69,8	10,47	15	72	10,8	15	55	8,25
4	Evaluasi Internal	10	-	-	25	72	18	25	46	11,5
5	Capaian Kinerja	20	64,38	12,88						
	Nilai Hasil Evaluasi	100		67,06	100	75,3	75,3	100		55,15
Nilai akhir hasil evaluasi $67,06/90 \times 100\%$				74,51			-			-
Tingkat Akuntabilitas Kinerja				BB			BB			CC

Rincian Hasil Evaluasi sebagai berikut :

Rekomendasi Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Belitung :

a. Peningkatan dalam perencanaan kinerja.

1. Melakukan perbaikan pada penjenjangan kinerja yang telah disusun dengan mempedomani PermenPAN RB Nomor 89 Tahun 2021, dan selanjutnya memanfaatkan penjenjangan/ cascading dan crosscutting kinerja tersebut sebagai dasar untuk penyempurnaan perencanaan kinerja secara keseluruhan.

Tanggapan :

Untuk Perjanjian Kinerja/Penjenjangan Kinerja Tahun 2024 dan Perubahan Tahun 2023 akan dibuatkan perubahan cascading dan perubahan/perbaikan perjanjian kinerja 2023 terutama pada Indikator Sasaran Strategis Eselon III dan IV serta Pelaksana/Staf, serta akan mempedomani penyusunan dokumen perjanjian kinerja/penjenjangan sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 89 tahun 2021.

2. Mencantumkan target capaian kinerja pada dokumen Rencana Aksi secara periodik (Per Triwulan) untuk mempermudah melakukan pemantauan/ pengukuran pencapaian target kinerja secara berkala/ periodik.

Tanggapan :

Rencana Aksi pada tahun mendatang akan diperbaharui dengan mencantumkan target kinerja indikator per Triwulan, bukan persentase capaian fisik dari masing-masing Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

b. Peningkatan dalam Pengukuran Kinerja melalui :

1. Pembuatan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

Tanggapan :

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengukuran Kinerja dan Pengumpulan Data Kinerja akan dibuatkan pada tahun berikutnya.

2. Melakukan proses supervisi secara berjenjang dalam proses penyusunan laporan kinerja.

Tanggapan :

Penyusunan laporan kinerja sudah berdasarkan supervisi berjenjang di masing-masing bidang, namun belum terjadwal secara sempurna dan belum terdokumentasikan serta belum teradministrasikan secara lengkap. Untuk penyusunan pelaporan selanjutnya akan dibuatkan jadwal, alur serta administrasi/kertas kerja supervisi penjenjangan.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam sebuah aplikasi terintegrasi terkait kegiatan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.

Tanggapan :

Dalam pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja, DSPPPA menggunakan teknologi informasi aplikasi Exel, pengolah angka, dengan melalui kertas kerja yang dibuatkan sendiri untuk mengumpulkan data kinerja (belum ada aplikasi/pemrograman secara khusus).

4. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

Tanggapan :

Dalam pengumpulan dan pengukuran capaian kinerja, DSPPPA menggunakan teknologi informasi aplikasi Exel, pengolah angka, dengan melalui kertas kerja yang dibuatkan sendiri untuk mengumpulkan data kinerja (belum ada aplikasi pemrograman secara khusus).

c. Peningkatan dan Pelaporan Kinerja melalui :

1. Mengungkapkan informasi yang memadai pada Laporan Kinerja Bab III Akuntabilitas Kinerja yaitu tentang :

- Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- Informasi target dan realisasi anggaran, pencapaian target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan yang menjadi kepedulian seluruh pegawai.

Tanggapan :

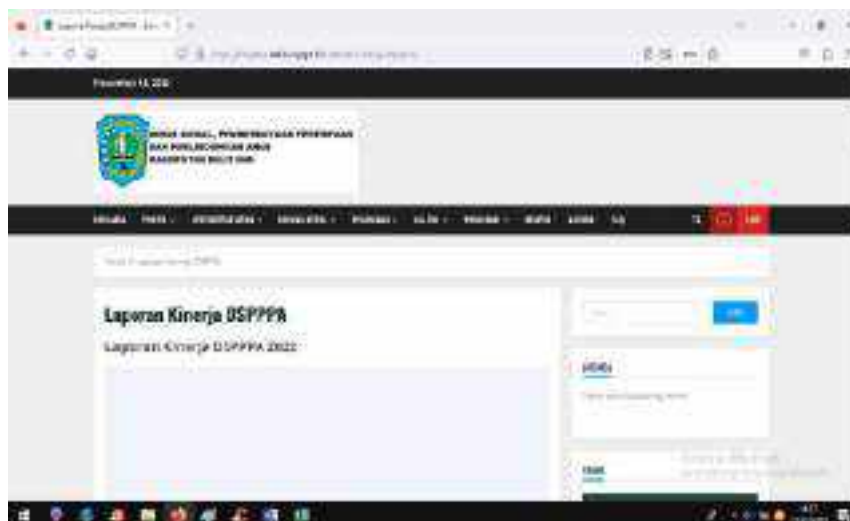
Penyusunan laporan kinerja DSPPPA telah menampilkan target dan realisasi sasaran jangka menengah, namun belum sepenuhnya menganalisis dan evaluasi dari tahun jangka menengah/ tahun-tahun sebelumnya. DSPPPA hanya menganalisis dan evaluasi tahun ini dan tahun sebelumnya. Analisis dan evaluasi ini serta informasi-informasi di atas akan dilengkapi pada penyusunan laporan tahun berikutnya.

2. Mempublikasikan dokumen laporan kinerja dalam website ataupun media lainnya yang dimiliki oleh Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

Tanggapan :

DSPPPA telah mempublikasikan Laporan Kinerja tahun 2022, 2021, 2020, 2017 pada Website Dinas : <https://dspppa.belitung.go.id/laporan-kinerja-dspppa/>

Namun, dikarenakan waktu pelaporan dan penguploadan berkas evaluasi singkat, jadi eviden ini tidak ditampilkan.



Gambar 3.9. Screenshot Website DSPPPA Kabupaten Belitung

d. Peningkatan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan melakukan :

1. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas secara berjenjang dari level pegawai atas hingga pegawai bawah serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan timbal balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Tanggapan :

Akan diperbaiki pada penyusunan dan evaluasi tahun berikutnya.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Tanggapan :

DSPPPA sudah menggunakan aplikasi pengolah kata (word), pengolah angka (exel), aplikasi web e-sakip dari Kemenpan, aplikasi web penilaian mandiri AKIP oleh Tim Evaluasi Inspektorat Prov/ BPKP dan akan memaksimalkan penggunaan/ pemanfaatan aplikasi tersebut.

3. Peningkatan kompetensi SDM pada DSPPPA melalui usulan Diklat maupun PPM terkait pelaksanaan Peraturan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 202 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tanggapan :

Anggaran Diklat/ PPM pegawai sudah masuk dalam Renstra ataupun renja awal. Namun dalam perjalanannya dikarenakan terbatasnya pagu anggaran, dan Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga untuk beberapa tahun terakhir anggaran diklat di nol kan. Sementara ini, DSPPPA mengikuti diklat gratis yang diselenggarakan oleh Inspektorat, Bappeda, dan lainnya.

Tanggapan terkait dengan kertas kerja Penilaian mandiri AKIP melalui aplikasi exel ataupun aplikasi website Penilaian Mandiri AKIP yaitu selain memenuhi rekomendasi diatas juga terkait waktu penguplodan yang singkat dengan banyaknya eviden yang harus disiapkan, sehingga belum bisa memenuhi semua evidence yang di minta. Untuk tahun berikutnya diupayakan agar bisa memenuhi semua komponen dalam kertas kerja AKIP dan evidennya.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung sebesar Rp. 10.396.592.963,- dan perubahannya sebesar Rp. 10.922.821.301,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 9.946.030.498,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 91,06%. Komposisi belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung untuk tahun 2023, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.36
Komposisi Belanja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2022 - 2023

No	Uraian	Anggaran Belanja (Rp) 2022	Realisasi Belanja (Rp) 2022	2022 %	Anggaran Belanja(Rp) 2023	Realisasi Belanja(Rp) 2023	2023 %
1	Belanja Tidak Langsung	4.572.393.613	4.310.635.584	94,28	4.710.920.863	4.511.881.503	95,77
2	Belanja Langsung	7.611.455.843	5.199.490.684	68,31	6.211.900.438	5.434.148.995	87,48
Jumlah		12.183.849.456	9.510.126.268	78,06	10.922.821.301	9.946.030.498	91,06

Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran (PPA) Kabupaten Belitung per 31 Desember tahun anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dan anggaran tahun 2023.

Pencapaian target kinerja diukur berdasarkan efektifitas dan efisiensi yang dicapai dan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendorong seperti tingkat SDM yang cukup termasuk mental, pengawasan intern maupun dari masyarakat yang cukup baik dan perencanaan yang cukup matang. Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sebagaimana tersaji pada ikhtisar laporan capaian target kinerja keuangan APBD berdasarkan program dan kegiatan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.37
Capaian Kinerja Keuangan Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2022 - 2023

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022				TAHUN 2023			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.442.146.988	5.500.191.063	5.150.803.728	93,65	7.659.568.146	7.869.294.732	7.366.615.043	93,61
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100	5.999.818	5.999.818	4.696.400	78,28
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	2.999.818	2.999.818	1.696.400	56,55
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.594.184.888	4.575.393.613	4.313.635.384	94,28	4.594.184.706	4.713.920.681	4.513.577.903	95,75
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.591.184.888	4.572.393.613	4.310.635.584	94,28	4.591.184.888	4.710.920.863	4.511.881.503	95,77
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.000.000	3.000.000	2.999.800	99,99	2.999.818	2.999.818	1.696.400	56,55

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022				TAHUN 2023			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.150.000	18.150.000	18.131.850	99,90	-	-	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18.150.000	18.150.000	18.131.850	99,90	-	-	-	-
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.185.800	342.836.050	341.976.400	99,75	262.552.300	284.286.102	261.667.550	92,04
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	7.000.000	6.999.500	99,99	7.000.000	7.000.000	6.966.500	99,51
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.434.800	56.434.800	56.049.600	99,32	52.747.200	52.747.200	52.433.300	99,40
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.000.000	14.000.000	13.997.800	99,98	14.000.000	14.000.000	13.961.000	99,72
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.304.000	103.061.250	102.890.000	99,83	101.105.100	101.105.100	93.838.800	92,81
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.700.000	43.700.000	43.699.500	100	40.700.000	40.700.000	25.788.300	63,36
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	4.500.000	5.640.000	5.340.000	94,68	5.760.000	5.760.000	5.760.000	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.247.000	113.000.000	113.000.000	100	41.240.000	62.973.802	62.920.150	99,91

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022				TAHUN 2023			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	2.398.358.400	2.429.358.400	2.223.962.400	91,55
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	31.000.000	30.810.000	99,39
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	2.398.358.400	2.429.358.400	2.193.152.400	90,28
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	42.385.100	37.125.000	87,59	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.084.300	288.484.300	220.529.716	96,52	220.683.000	226.034.809	220.915.780	97,74
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	1.683.400	56,11	3.000.000	3.000.000	660.000	22,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000	51.600.000	52.955.316	89,15	51.600.000	56.951.809	54.364.780	95,46
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.084.300	166.084.300	165.891.000	99,88	166.083.000	166.083.000	165.891.000	99,88
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	286.942.000	286.942.000	213.405.378	74,37	177.789.922	209.694.922	141.795.922	67,62

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		TAHUN 2022				TAHUN 2023			
		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	46.000.000	46.000.000	27.308.500	59,37
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208.750.000	208.750.000	139.323.778	66,74	87.750.000	119.655.000	78.062.920	65,24
	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	2.240.000	74,67	3.000.000	3.000.000	-	0,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.640.000	21.640.000	18.486.600	85,43	21.040.000	21.040.000	17.500.000	83,17
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	53.552.000	53.552.000	53.355.000	99,63	19.999.922	19.999.922	18.923.590	94,62
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		471.878.335	3.887.579.047	2.273.292.575	58,48	327.882.043	408.808.768	362.053.507	88,56
Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		471.978.335	3.887.579.047	2.273.292.575	58,48	327.882.043	408.808.768	362.053.507	88,56
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	159.905.985	151.205.985	129.669.465	85,76	159.901.968	151.263.393	122.894.657	81,25
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga	79.365.500	3.536.713.017	1.962.453.360	55,49	79.346.115	68.911.415	66.473.500	96,46

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		TAHUN 2022				TAHUN 2023			
		ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
	Kewenangan Kabupaten/Kota								
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	144.069.300	121.340.450	112.043.250	92,34	-	100.000.000	97.848.800	97,85
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	88.646.550	78.319.595	69.126.500	88,26	88.633.960	88.633.960	74.836.550	84,43
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		625.971.340	559.157.040	473.578.624	84,70	496.247.420	472.694.420	391.808.9722	82,89
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	536.520.400	490.180.600	462.154.917	94,28	423.364.670	386.814.670	352.522.822	91,13
	Penyediaan Permakanan	217.349.200	219.138.700	216.227.703	98,69	215.740.750	215.740.750	212.227.500	98,37
	Penyediaan Alat Bantu	69.727.000	40.572.000	36.049.600	88,85	-	-	-	-
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	146.747.800	143.939.050	140.531.750	97,63	141.020.250	109.270.250	95.502.340	87,40
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	102.701.400	86.530.850	69.295.864	80,08	66.603.670	61.803.670	44.792.982	72,48

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022				TAHUN 2023			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	89.450.940	68.976.440	11.423.707	16,56	72.882.750	85.879.750	39.286.150	45,75
Penyediaan Permakanan	8.662.500	6.993.000	2.447.500	35,00	6.909.750	9.906.750	6.680.000	67,43
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	20.605.000	15.000.000	-	0,00	16.500.000	16.500.000	1.500.000	9,09
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60.183.440	46.983.440	8.976.207	19,11	49.473.000	59.473.000	31.106.150	52,30
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	341.561.650	426.311.650	420.185.855	98,56	497.094.362	738.336.850	481.414.604	65,20
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	341.561.650	426.311.650	420.185.855	98,56	497.094.362	738.336.850	481.414.604	65,20
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	341.561.650	426.311.650	420.311.650	98,56	340.678.650	474.938.638	462.351.354	97,35
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	-	156.415.712	263.398.212	19.063.250	7,24
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	445.395.900	445.395.900	402.359.450	90,34	444.430.180	444.430.180	388.706.200	87,46
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	445.395.900	445.395.900	402.359.450	90,34	444.430.180	444.430.180	388.706.200	87,46

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022				TAHUN 2023			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	445.395.900	445.395.900	402.359.450	90,34	444.430.180	444.430.180	388.706.200	87,46
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	6.721.660	6.721.660	3.584.560	53,33	86.975.400	86.975.400	82.405.000	94,75
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6.721.660	6.721.660	3.584.560	53,33	86.975.400	86.975.400	82.405.000	94,75
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	6.721.660	6.721.660	3.584.560	53,33	86.975.400	86.975.400	82.405.000	94,75
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	260.255.075	850.033.630	324.257.269	35,44	457.383.073	517.180.698	509.312.773	99,32
Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	34.604.850	21.434.480	21.384.012	99,76	34.547.070	34.547.070	30.192.917	87,40
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	18.800.050	5.929.680	5.901.050	99,52	18.758.590	18.758.590	17.095.037	91,13
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	15.804.800	15.804.800	15.482.962	99,86	15.788.480	15.788.480	13.097.880	82,96

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022				TAHUN 2023			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	211.321.575	814.270.500	288.553.107	35,44	408.542.995	468.340.620	465.143.706	99,32
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	17.721.500	529.584.725	17.709.300	3,34	17.684.400	17.684.400	16.575.150	93,73
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	193.600.075	284.685.775	270.843.807	95,14	390.858.595	450.656.220	448.568.556	99,54
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.328.650	14.328.650	14.320.150	99,94	14.293.008	14.293.008	13.976.150	97,78
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.328.650	14.328.650	14.320.150	99,94	14.293.008	14.293.008	13.976.150	97,78
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	126.767.100	222.633.055	191.942.025	84,84	126.224.672	103.865.803	89.449.911	86,12
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kab/ Kota	-	28.875.288	27.558.200	95,44	-	-	-	-

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022				TAHUN 2023			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	-	28.875.288	27.558.200	95,44	-	-	-	-
Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	126.767.100	193.757.767	164.383.825	84,84	126.224.672	103.865.803	89.449.911	86,12
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	126.767.100	126.767.100	116.983.825	92,28	126.224.672	103.865.803	89.449.911	86,12
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	66.990.667	47.400.000	70,76	-	-	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	27.260.825	27.260.825	23.228.225	85,21	-	-	-	-
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG	27.260.825	27.260.825	23.228.225	85,21	-	-	-	-

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022				TAHUN 2023			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Kabupaten/ Kota	27.260.825	27.260.825	23.288.225	85,21	-	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	42.727.420	41.827.420	37.225.856	89,00	42.703.164	42.703.164	42.600.300	99,76
Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	42,727,420	41,827.420	37.225.856	89,00	42.703.164	42.703.164	42.600.300	99,76
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	42,727,420	41,827.420	37.225.856	89,00	42.703.164	42.703.164	42.600.300	99,76
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	239.615.450	190.401.171	184.599.426	96,25	186.167.434	173.203.252	166.490.740	96.12
Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	30.803.000	11.828.383	10.757.151	90,94	14.821.619	12.046.619	9.720.344	80,69
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	30.803.000	11.828.383	10.757.151	90,94	14.821.619	12,046.619	9.720.344	80,69

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022				TAHUN 2023			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	208.812.450	178.572.788	173.842.275	97,35	171.345.815	161.156.633	156.770.396	97,28
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	208.812.450	178.572.788	173.842.275	97,35	171.345.815	161.156.633	156.770.396	97,28
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	6.701.800	26.336.995	25.068.675	97,33	71.917.069	65.328.034	65.173.448	99,76
Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.701.800	26.336.995	25.068.675	97,33	71.917.069	65.328.034	65.328.448	99,76
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	19.635.195	19.110.825	97,33	71.917.069	65.328.034	65.328.448	99,76

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TAHUN 2022				TAHUN 2023			
	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN INDUK	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.701.800	6.701.800	5.957.850	88,90	-	-	-	-
T O T A L	8.037.103.543	12.183.849.456	9.510.126.268	78,06	10.396.592.963	10.922.821.301	9.946.030.498	91,06

Berdasarkan Pengukuran Perjanjian kinerja dan memperhatikan hasil-hasil perhitungan yang tergambar dalam format Pengukuran Perjanjian Kinerja dapat dijelaskan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 dari Pagu Anggaran Setelah perubahan (Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp. 10.922.821.301,- dengan 11 Program, 20 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.946.030.498,- dan Persentase terhadap total Anggaran 91,06%.

Terkait pagu dan realisasi anggaran dengan pencapaian target tujuan/sasaran strategis dan indikator kinerja pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada tahun 2023 lebih rinci dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.38

Pagu dan Realisasi Anggaran

Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2022 dan 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	2022				2023			
		Jumlah Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Jumlah Indikator	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS	2	10.825.356.360	8.723.804.792	80,59	2	10.020.540.350	9.073.003.326	90,54
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup Perempuan	2	1.141.754.930	576.653.375	50,51	2	663.749.665	641.362.984	96,63

3	Tujuan: Terpenuhinya hak anak Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak	2	216.738.166	209.668.101	96,74	2	238.531.286	231.664.188	97,12
Jumlah		6	12.183.849.456	9.510.126.268	78,06	6	10.922.821.301	9.946.030.498	91,06

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung pada tahun 2023. Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.39

Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Tujuan/Sasaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran	Jumlah Indikator	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
			% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran		% Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran	
				Realisasi	%		Realisasi	%
1	Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan PMKS Sasaran: Meningkatnya Penanganan PMKS	2	157,75	8.723.804.792	80,59	1898,43	9.073.003.326	90,54
2	Tujuan: Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup perempuan	2	92,39	576.653.375	50,51	108,50	641.362.984	96,63

3	Tujuan: Terpenuhinya hak anak							
	Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup anak	2	138,29	209.668.101	96,74	144,03	231.664.188	97,12
	Jumlah	6	129,47	9.510.126.268	78,06	716,99	9.946.030.498	91,06

3.3.1. Analisis Efektivitas dan Efisiensi dan Penggunaan Anggaran terhadap Capaian Kinerja Program

1. Efektivitas Anggaran

Menurut Mahsun (2009), efektivitas sebagai gambaran mengenai kemampuan satuan kerja dalam merealisasikan anggaran belanja yang sebelumnya telah dianggarkan. Tingkat efektivitas dihitung melalui perbandingan antara realisasi anggaran dengan target anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi pengukuran efisiensi anggaran menurut Mahsun (2009) adalah dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Tingkatan efektivitas sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.40 Tingkatan Efektivitas Kinerja

No.	Tingkat Pencapaian	Kategori
1	Tingkat pencapaian di atas 100%	Sangat Efektif
2	Tingkat pencapaian antara 90% - 100%	Efektif
3	Tingkat pencapaian antara 80% - 90%	Cukup Efektif
4	Tingkat pencapaian antara 60% - 80%	Kurang Efektif
5	Tingkat pencapaian di bawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : JDIIH Kemendagri

Jika dimasukkan dalam rumusan dan kategori tersebut, anggaran dan realisasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung terlihat pada Tabel 3.41. berikut :

Tabel 3.41. Efektivitas pengelolaan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$	Kategori
10.922.821.301	9.946.030.498	Efektivitas = $\frac{9.946.030.498}{10.922.821.301} \times 100\%$ = 91,06%	Efektif

Berdasarkan data pada Tabel 3.41. dan berdasarkan rumus di atas diambil kesimpulan persentase efektivitas pengelolaan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten termasuk kategori **Efektif**.

2. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran menurut Mahsun (2009) dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.42 Tabel Tingkatan Efisiensi Anggaran

No.	Tingkat Pencapaian	Keterangan
1	Tingkat pencapaian di atas 100%	Tidak Efisien
2	Tingkat pencapaian antara 90% - 100%	Kurang Efisien
3	Tingkat pencapaian antara 80% - 90%	Cukup Efisien
4	Tingkat pencapaian antara 60% - 80%	Efisien
5	Tingkat pencapaian di bawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : JDIH Kemendagri

Jika dimasukkan dalam rumusan dan kategori tersebut, anggaran dan realisasi anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung terlihat pada Tabel 3.43. berikut :

Tabel 3.43. Efisiensi penggunaan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Realisasi Belanja Langsung	Realisasi Anggaran	Efisiensi = Realisasi Belanja Langsung / Realisasi Anggaran Belanja x 100%	Kategori
5.434.148.995	9.946.030.498	$\text{Efisiensi} = \frac{5.434.148.995}{9.946.030.498} \times 100\%$ $= 54,64\%$	Sangat Efisien

Berdasarkan data pada Tabel 3.43 dan berdasarkan rumus di atas diambil kesimpulan persentase efisiensi penggunaan anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten termasuk kategori **Sangat Efisien.**

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Menurut Mangkunegara dalam Khaerul Umam (2010:189) yang mempengaruhi kinerja yaitu kemampuan, motivasi dan sikap mental.

a. Faktor Kemampuan

Ketercapaian kinerja dalam factor kemampuan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu SDM dan ketersediaan anggaran. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung terdiri dari 41 orang pegawai, terdiri dari 27 orang ASN dan 14 orang Non ASN yang tersebar di Kantor Dinas, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan Taman Makan Pahlawan (TMP) Ksatria Tumbang Ganti. SDM Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dengan latar belakang Pendidikan dari Jenjang SMP hingga S2 memiliki integritas yang tinggi dan keahlian sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Pada tahun 2023, jumlah anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Rp. 10.922.821.301,- terdiri dari 11 Program, 20 Kegiatan dan 45 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh ASN yang bersertifikasi.

b. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi/ kondisi/ keadaan lingkungan kerja. Kantor kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung berada di Kota Tanjungpandan sangat memudahkan untuk saling berkoordinasi/ konsultasi antar dinas dengan jarak tempuh yang cukup dekat dari Kantor Bupati Belitung ataupun Kantor Dinas/ Instansi Lainnya. Bangunan kantor dinas juga memiliki perlengkapan dan peralatan yang cukup mendukung untuk bekerja dalam kondisi baik.

c. Sikap Mental

ASN Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung senantiasa menunjukkan sikap saling menghargai pendapat, mau bekerjasama dan mengutamakan kepentingan/ tujuan organisasi. Menurut Moekijat (2008) jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dapat ditentukan dengan menghitung jumlah waktu yang dibutuhkan dan jumlah beban kerja.

Tujuan/Sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN UMUM

Dari Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung telah menunjukkan pencapaian kinerja yang signifikan atas tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 memberi kesimpulan bahwa capaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 dapat tercapai dengan baik (terdapat dua indikator negatif), dengan nilai rata-rata capaian dari 6 (enam) Indikator Kinerja adalah 716,99% dan persentase realisasi anggaran 91,06%. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023 diselenggarakan secara sinergi melalui Program sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- 2) Program Pemberdayaan Sosial
- 3) Program Rehabilitasi Sosial
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 5) Program Penanganan Bencana
- 6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
- 7) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 8) Program Perlindungan Perempuan
- 9) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
- 10) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 11) Program Perlindungan Khusus Anak.

Faktor pendukung dari pencapaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung yaitu adanya respon yang baik dari masyarakat Belitung terhadap penanganan PMKS, terjalannya

Sinergitas antar instansi dalam penanganan PMKS, adanya SDM yang kompeten di bidang Sosial dan PPA, dan tersedianya anggaran dan sarana prasarana. Sedangkan Faktor Penghambat dari pencapaian target yaitu adanya data PMKS belum valid, masih ada beberapa SDM yang belum memiliki kompetensi di bidang Sosial dan PPA, masih terjadinya ego sektoral di berbagai lini, dan masih ada beberapa sub kegiatan yang memiliki anggaran terbatas. Dan solusi untuk perbaikan ke depan yaitu melaksanakan verifikasi dan verifikasi data PMKS, perlunya peningkatan kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial maupun PPA, menjalin sinergitas dengan berbagai pihak, penambahan anggaran, dan penyediaan sarana dan prasarana.

Untuk kinerja lainnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung selain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang terangkum dalam Program Begalor, juga terdapat 2 (dua) penghargaan yang diterima yaitu Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kategori Madya dan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Pratama.

Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023, yang diharapkan akan dapat lebih meningkatkan kinerja pencapaian sasaran yang ditetapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan, kekurangan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia. Segala kekurangan dalam pelaksanaan program dapat menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Dengan demikian diharapkan nantinya terjadi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung.

2. LANGKAH PERBAIKAN KE DEPAN

Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung sepanjang Tahun 2023, agar lebih meningkat ditahun selanjutnya adalah :

- 1) Mengusulkan Sarana dan Prasarana Rumah Pelayanan Sosial maupun kendaraan operasional pada Anggaran 2024,
- 2) Memverifikasi dan Verifali data PMKS secara berkala,
- 3) Penyiapan dan Penguatan SDM Kessos melalui Diklat atau Bimtek,
- 4) Menguatkan peran tugas dan fungsi Gugus Tugas KLA
- 5) Melaksanakan pelatihan-pelatihan atau Bimtek untuk penguatan SDM di lembaga pemenuhan hak anak.
- 6) Melakukan kampanye pemenuhan hak dan perlindungan secara terus menerus kepada masyarakat.

Laporan Kinerja sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, akan dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan diharapkan bisa memberi masukan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja ini benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Demikianlah Laporan Kinerja Dinsa Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung disusun dan disampaikan atas perhatian terima kasih.

Tanjungpandan, 29 Februari 2024
Kepala Dinas,

KASIMIN, S.IP., MAB
Dis. DP
Pembina Utama Muda
NIP. 196908241990031004

LAMPIRAN

- Lampiran I : Target dan realisasi outcome, beserta target dan realisasi penggunaan SDM dan dana yang dikelompokkan menurut sastra/sasprog/ saskeg (termasuk perhitungan efisiensi)
- Lampiran II : Perbandingan realisasi outcome, beserta realisasi penggunaan SDM dan dana tahun 2023 dengan tahun lalu yang dikelompokkan menurut sastra/saprog/saskeg;
- Lampiran III : Target dan realisasi Indikator output kegiatan (IOK), beserta target dan realisasi penggunaan SDM dan dana yang dikelompokkan menurut sasaran output kegiatan (termasuk perhitungan efisiensi);
- Lampiran IV : Perbandingan realisasi output, beserta realisasi penggunaan SDM dan dana tahun 2023 dengan tahun lalu yang dikelompokkan menurut sasaran output kegiatan;
- Lampiran V : Rincian target dan realisasi program prioritas yang tercapai sesuai target;
- Lampiran VI : Rincian target dan realisasi kegiatan prioritas yang tercapai sesuai target;
- Lampiran VII : Rincian target dan realisasi proyek prioritas strategis (PPS) yang tercapai sesuai target;
- Lampiran VIII : Rincian target dan realisasi proyek strategis nasional (PSN) yang tercapai sesuai target;
- Lampiran IX : Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023
- Lampiran X : Perjanjian Kinerja 2023
- Lampiran XI : Capaian Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2023
- Lampiran XII : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2023

LAMPIRAN I
TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN TAHUN 2023

Sarprog/ Sarkeg		Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program/ Kegiatan				Anggaran			SDM		
			Satuan	Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	%
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	7.869.294.732	7.366.615.043	93,61	9	9	100
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	75	78,8	104,93						
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	100						
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	100						
1.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	5.999.818	4.696.400	78,28	9	9	100
1.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	4.713.920.681	4.513.577.903	95,75	9	9	100
1.3	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	284.286.102	261.667.550	92,04	9	9	100
1.4	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis pengadaan barang milik daerah	Jenis	2	2	100	2.429.358.400	2.223.962.400	91,55	9	9	100
1.5	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	100	226.034.809	220.915.780	97,74	9	9	100

1.6	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	Jenis	6	6	100	209.694.922	141.795.010	67,62	9	9	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100			87,16			100,00
2	Terlaksananya program pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	%	100	38,6	38,6	408.808.768	362.053.507	88,56	6	6	100
2.1	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS aktif	PSKS	165	164	99,39	408.808.768	362.053.507	88,56	6	6	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						99,39			88,56			100,00
3	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi diluar panti yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	472.694.420	391.808.972	82,89	7	7	100
3.1	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Orang	105	105	100	386.814.670	352.522.822	91,13	7	7	100
3.2	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti	Persentase PMKS yang menerima layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	85.879.750	39.286.150	45,75	7	7	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100			68,44			100
4	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	%	100	88,31	88,31	738.336.850	481.414.604	65,20	13	13	100
4.1	Tersedianya Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi	%	100	44,21	44,21	738.336.850	481.414.604	65,20	13	13	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						44,21			65,20			100,00

5	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	%	100	100	100	444.430.180	388.706.200	87,46	7	7	100
5.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	444.430.180	388.706.200	87,46	7	7	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100			87,46			100,00
6	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang tertata	%	100	100	100	86.975.400	82.405.000	94,75	6	6	100
6.1	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan	%	100	100	100	86.975.400	82.405.000	94,75	6	6	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100			94,75			100,00
7	Meningkatnya Penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,5	48,48	9696	517.180.698	509.312.773	98,48	2	2	100
7.1	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	PD	10	16	160	34.547.070	30.192.917	87,40	2	2	100
7.2	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terfasilitasinya organisasi perempuan	Organisasi	19	19	100	468.340.620	465.143.706	99,32	2	2	100
7.3	Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya forum puspa Kabupaten Belitung	Lembaga	1	1	100	14.293.008	13.976.150	97,78	2	2	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						120			94,83			100,00
8	Terlaksananya layanan perlindungan perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	%	100	100	100	103.865.803	89.449.911	86,12	4	4	100

8.1	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	Lembaga	3	3	100	103.865.803	89.449.911	88,56	4	4	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100			88,56			100,00
9	Tersedianya data gender dan anak	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi gender dan anak	%	25	75	300	42.703.164	42.600.300	99,76	2	2	100
9.1	Terlaksananya kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data gender dan anak	Dokumen	1	1	100	42.703.164	42.600.300	99,76	2	2	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100			99,76			100,00
10	Terpenuhinya Hak Anak di Kabupaten Belitung	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	Madya	Madya	173.203.252	166.490.740	96,12	4	4	100
10.1	Meningkatnya status KLA	Tercapainya peningkatan status KLA	Point	750	601	80,13	12.046.619	9.720.344	80,69	4	4	100
10.2	Meningkatnya layanan terhadap anak	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung	Dok	1	1	100	161.156.633	156.770.396	97,28	4	4	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						90,07			88,98			100,00
11	Terlindunginya anak dari korban kekerasan	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	65.328.034	65.173.448	99,76	4	4	100
11.1	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota	Tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	%	100	100	100	65.328.034	65.173.448	99,76	4	4	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>						100			99,76			100,00
TOTAL						95,79			87,59			100,00

LAMPIRAN II
PERBANDINGAN REALISASI SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN

Sarprog/ Sarkeg		Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Kinerja Program								
			Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik/ (Turun)	Capaian 2023	Capaian 2022	Naik/ (Turun)	Target 2024	% Realisasi thd target 2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	78,8	78,7	Tetap	104,93	104,93	Tetap	78,8	100
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
1.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	Tetap	100	100	Tetap	6	100
1.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	Tetap	100	100	Tetap	3	100
1.3	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
1.4	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis pengadaan barang milik daerah	Jenis	2	1	Naik	100	100	Tetap	1	200
1.5	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100

1.6	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	Jenis	6	6	Tetap	100	100	Tetap	6	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100			116,67
2	Terlaksananya program pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	%	38,6	42,14	Naik	38,6	42,14	Naik	100	38,6
2.1	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS aktif	PSKS	164	165	Turun	99,39	100	Turun	165	99,39
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							99,39	100			99,39
3	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi diluar panti yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
3.1	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Orang	105	105	Tetap	100	100	Tetap	105	100
3.2	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti	Persentase PMKS yang menerima layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100			100
4	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	%	88,31	97,25	Turun	88,31	97,25	Turun	100	88,31
4.1	Tersedianya Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi	%	44,21	17,5	Naik	44,21	17,5	Naik	100	44,21
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							44,21	17,5			44,21

5	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Kabupaten	Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Kabupaten	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
5.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten Kabupaten	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100			100
6	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang tertata	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
6.1	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100			100
7	Meningkatnya Penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	48,48	35,75	Naik	9696	7150	Naik	36	134,67
7.1	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	PD	16	10	Naik	160	100	Naik	10	160
7.2	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terfasilitasinya organisasi perempuan	Organisasi	19	19	Tetap	100	100	Tetap	19	100
7.3	Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya forum puspa Kabupaten Belitung	Lembaga	1	1	Tetap	100	100	Tetap	1	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							120	100			120
8	Terlaksananya layanan perlindungan perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100

8.1	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	Lembaga	3	3	Tetap	100	100	Tetap	3	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100			100
9	Tersedianya data gender dan anak	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi gender dan anak	%	75	55,8	Naik	300	223,2	Naik	65	115,38
9.1	Terlaksananya kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data gender dan anak	Dokumen	1	1	Tetap	100	100	Tetap	1	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100			100
10	Terpenuhinya Hak Anak di Kabupaten Belitung	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Madya	Pratama	Naik	Madya	Pratama	Naik	Madya	100
10.1	Meningkatnya status KLA	Tercapainya peningkatan status KLA	Point	601	581,52	Naik	80,13	77,54	Naik	Madya	100
10.2	Meningkatnya layanan terhadap anak	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung	Dok	1	1	Tetap	100	100	Tetap	1	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							90,07	88,77			100,00
11	Terlindunginya anak dari korban kekerasan	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
11.1	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota	Tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap	100	100
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100			100
TOTAL							95,79	91,48			98,21

3	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	100		Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi diluar panti yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	472.694.420	391.808.972	82,89	7	7	100	v		v	
3.1	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	120	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Orang	105	105	100	386.814.670	352.522.822	91,13	7	7	100	v		v	
3.2	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti	252,78	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti	Persentase PMKS yang menerima layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	100	85.879.750	39.286.150	45,75	7	7	100	v		v	
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>											68,44			100				
4	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	88,31		Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	%	100	88,31	88,31	738.336.850	481.414.604	65,20	13	13	100	v		v	
4.1	Tersedianya Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	82,69	Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi	%	100	44,21	44,21	738.336.850	481.414.604	65,20	13	13	100	v		v	
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>											65,20			100,00				
5	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100		Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	%	100	100	100	444.430.180	388.706.200	87,46	7	7	100	v		v	
5.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100	Terlayaninya korban bencana	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	100	444.430.180	388.706.200	87,46	7	7	100	v		v	
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>											87,46			100,00				
6	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan	100		Taman Makam Pahlawan yang tertata	%	100	100	100	86.975.400	82.405.000	94,75	6	6	100	v		v	
6.1	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	100	Terpeliharanya taman makam pahlawan	Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan	%	100	100	100	86.975.400	82.405.000	94,75	6	6	100	v		v	
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>											94,75			100,00				
7	Meningkatnya Penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	9696		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	0,5	48,48	9696	517.180.698	509.312.773	98,48	2	2	100	v		v	
7.1	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	94,29	Terlaksananya Kebijakan PUG	Lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	PD	10	16	160	34.547.070	30.192.917	87,40	2	2	100	v		v	
7.2	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terfasilitasinya organisasi perempuan	Organisasi	19	19	100	468.340.620	465.143.706	99,32	2	2	100	v		v	

7.3	Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan dan anak	100	Meningkatnya layanan Pemberdayaan Perempuan dan anak	Terfasilitasinya forum puspa Kabupaten Belitung	Lembaga	1	1	100	14.293.008	13.976.150	97,78	2	2	100	v		v			
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>											94,83			100,00						
8	Terlaksananya layanan perlindungan perempuan	100		Persentase layanan perlindungan perempuan	%	100	100	100	103.865.803	89.449.911	86,12	4	4	100	v		v			
8.1	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	122,5	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	Lembaga	3	3	100	103.865.803	89.449.911	88,56	4	4	100	v		v			
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>											88,56			100,00						
9	Tersedianya data gender dan anak	300		Persentase pemenuhan data dan sistem informasi gender dan anak	%	25	75	300	42.703.164	42.600.300	99,76	2	2	100	v		v			
9.1	Terlaksananya kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	Data terpilah gender dan anak yang akurat	Tersedianya data gender dan anak	Dokumen	1	1	100	42.703.164	42.600.300	99,76	2	2	100	v		v			
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>											99,76			100,00						
10	Terpenuhinya Hak Anak di Kabupaten Belitung	Madya		Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Pratama	Madya	Madya	173.203.252	166.490.740	96,12	4	4	100	v		v			
10.1	Meningkatnya status KLA	100	Meningkatnya perlindungan terhadap anak	Tercapainya peningkatan status KLA	Point	750	601	80,13	12.046.619	9.720.344	80,69	4	4	100	v		v			
10.2	Meningkatnya layanan terhadap anak	100	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung	Dok	1	1	100	161.156.633	156.770.396	97,28	4	4	100	v		v			
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>											88,98			100,00						
11	Terlindunginya anak dari korban kekerasan	100		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	65.328.034	65.173.448	99,76	4	4	100	v		v			
11.1	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	100	Meningkatnya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	Tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	%	100	100	100	65.328.034	65.173.448	99,76	4	4	100	v		v			
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>											99,76			100,00						
TOTAL														95,79				100,00		

LAMPIRAN IV
PERBANDINGAN REALISASI INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN (IOK)

Sarprog/ Sarkeg		Output Kegiatan							
		Indikator Output Kegiatan	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik/ (Turun)	Capaian 2023	Capaian 2022	Naik/ (Turun)
1		4	5	7	5	6	8	8	9
1	Terlaksananya Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
		Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	%	78,8	78,7	Tetap	104,93	104,93	Tetap
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
		Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
1.1	Terselenggaranya proses Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen hasil Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	Tetap	100	100	Tetap
1.2	Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	Tetap	100	100	Tetap
1.3	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
1.4	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis pengadaan barang milik daerah	Jenis	2	1	Naik	100	100	Tetap
1.5	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap

1.6	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik	Jenis	6	6	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100	
2	Terlaksananya program pemberdayaan sosial	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	%	38,6	42,14	Naik	38,6	42,14	Naik
2.1	Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS aktif	PSKS	164	165	Turun	99,39	100	Turun
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							99,39	100	
3	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi diluar panti yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
3.1	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan rehabilitasi sosial	Orang	105	105	Tetap	100	100	Tetap
3.2	Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti	Persentase PMKS yang menerima layanan rehabilitasi sosial	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100	
4	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	%	88,31	97,25	Turun	88,31	97,25	Turun
4.1	Tersedianya Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi	%	44,21	17,5	Naik	44,21	17,5	Naik
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							44,21	17,5	

5	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Persentase korban bencana alam sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
5.1	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100	
6	Terkelolanya Taman Makam Pahlawan	Taman Makam Pahlawan yang tertata	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
6.1	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100	
7	Meningkatnya Penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	48,48	35,75	Naik	9696	7150	Naik
7.1	Terlaksananya Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Lembaga pemerintah daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	PD	16	10	Naik	160	100	Naik
7.2	Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terfasilitasinya organisasi perempuan	Organisasi	19	19	Tetap	100	100	Tetap
7.3	Meningkatnya layanan pemberdayaan perempuan dan anak	Terfasilitasinya forum puspa Kabupaten Belitung	Lembaga	1	1	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							120	100	
8	Terlaksananya layanan perlindungan perempuan	Persentase layanan perlindungan perempuan	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap

8.1	Meningkatnya layanan perlindungan perempuan	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	Lembaga	3	3	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100	
9	Tersedianya data gender dan anak	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi gender dan anak	%	75	55,8	Naik	300	223,2	Naik
9.1	Terlaksananya kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya data gender dan anak	Dokumen	1	1	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100	
10	Terpenuhinya Hak Anak di Kabupaten Belitung	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Pratama	Madya	Pratama	Naik	Madya	Pratama	Naik
10.1	Meningkatnya status KLA	Tercapainya peningkatan status KLA	Point	601	581,52	Naik	80,13	77,54	Naik
10.2	Meningkatnya layanan terhadap anak	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung	Dok	1	1	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							90,07	88,77	
11	Terlindunginya anak dari korban kekerasan	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
11.1	Tersedianya layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota	Tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/Kelurahan	%	100	100	Tetap	100	100	Tetap
<i>Rata-rata Capaian Kegiatan</i>							100	100	
TOTAL							95,79	91,48	

LAMPIRAN V
JUMLAH PROGRAM PRIORITAS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No.	Unit Kerja	Target Jumlah PP yang mencapai Target	Realisasi PP yang mencapai target	%
-	-	-	-	-
JUMLAH				

LAMPIRAN VI
JUMLAH KEGIATAN PRIORITAS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No.	Unit Kerja	Target Jumlah KP yang mencapai Target	Realisasi KP yang mencapai target	%
-	-	-	-	-
JUMLAH				

LAMPIRAN VII
JUMLAH PROYEK PRIORITAS STRATEGIS YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No.	Unit Kerja	Target Jumlah PPS yang mencapai Target	Realisasi PPS yang mencapai target	%
-	-	-	-	-
JUMLAH				

LAMPIRAN VIII
JUMLAH PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TERCAPAI SESUAI TARGET
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG

No.	Unit Kerja	Target Jumlah PSN yang mencapai Target	Realisasi PSN yang mencapai target	%
-	-	-	-	-
JUMLAH				

RANCANGAN PEMBAHASAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KABUPATEN BELITUNG

6) DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Miskin ekstrem	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Catatan Penting				
			stunting	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	DPA 2023	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)	(11)	(12)				
	URUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
1	Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL														
1	01	Bidang Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL													
		Tujuan	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS Per Tahun		0,5			0,5							
		Sasaran	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani		80 %			80 %							
1	01	2	01	II Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		100 %	5.235.794.809		7.659.568.146	100 %	8.476.352.930			
1	01	2	01	1. Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen hasil perencanaan penganggaran dan evaluasi perangkat daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai peraturan		6 Dokumen 100 %	6.000.000	APBD Kabupaten	5.999.818	6 Dokumen 100 %	5.999.818 APBD Kabupaten			
1	01	2	01	01	Sub Kegiatan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Tanjungpandan	3 Dokumen	3.000.000	APBD Kabupaten	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000	APBD Kabupaten	
1	01	2	01	07	Sub Kegiatan	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tanjungpandan	3 Laporan	3.000.000	APBD Kabupaten	2.999.818	3 Laporan	2.999.818	APBD Kabupaten	
1	01	2	02	2. Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Keuangan perangkat Daerah Hasil : Terpenuhinya dokumen keuangan sesuai peraturan		3 Dokumen 100 %	4.594.184.888	APBD Kabupaten	4.594.184.706	3 Dokumen 100 %	4.603.920.681 APBD Kabupaten			
1	01	2	02	01	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Tanjungpandan	32 Orang/bulan	4.591.184.888	APBD Kabupaten	4.591.184.888	28 Orang/bulan	4.600.920.863	APBD Kabupaten	posisi skrg 28 pegawai
1	01	2	02	08	Sub Kegiatan	2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Tanjungpandan	2 Dokumen	3.000.000	APBD Kabupaten	2.999.818	2 Dokumen	2.999.818	APBD Kabupaten	
						2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		75 %				75 %				
1	01	2	05	3. Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah Hasil : Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		46 Orang 75 %	0	APBD Kabupaten	-	40 Orang 75 %	30.000.000	APBD Kabupaten		
1	01	2	05	02	Sub Kegiatan	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran : Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Tanjungpandan	0 paket	0	APBD Kabupaten	-	0 paket	0	APBD Kabupaten	
1	01	2	05	02	Sub Kegiatan	2 Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Tanjungpandan	0 Orang kali	0	APBD Kabupaten	-	3 Orang kali	30.000.000	APBD Kabupaten	30.000.000
						3. Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah		100 %				100 %				
1	01	2	06	4. Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah		100 % 100 %	236.535.621	APBD Kabupaten	262.552.300	100 % 100 %	312.552.300	APBD Kabupaten		
1	01	2	06	01	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tanjungpandan	1 paket	7.000.000	APBD Kabupaten	7.000.000	1 paket	7.000.000	APBD Kabupaten	
1	01	2	06	02	Sub Kegiatan	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tanjungpandan	2 paket	52.771.621	APBD Kabupaten	52.747.200	2 paket	52.747.200	APBD Kabupaten	
1	01	2	06	03	Sub Kegiatan	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran : Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Tanjungpandan	1 paket	14.000.000	APBD Kabupaten	14.000.000	1 paket	14.000.000	APBD Kabupaten	
1	01	2	06	04	Sub Kegiatan	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Tanjungpandan	2 paket	101.304.000	APBD Kabupaten	101.105.100	2 paket	101.105.100	APBD Kabupaten	

1	01	2	06	05	Sub Kegiatan 5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Keluaran : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tanjungpandan	1 paket	40.700.000	APBD Kabupaten	40.700.000		1 paket	40.700.000	APBD Kabupaten	
1	01	2	06	06	Sub Kegiatan 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Keluaran : Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tanjungpandan	1 dokumen	5.760.000	APBD Kabupaten	5.760.000		1 dokumen	5.760.000	APBD Kabupaten	
1	01	2	06	07	Sub Kegiatan 7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tanjungpandan	12 laporan	15.000.000	APBD Kabupaten	41.240.000		12 laporan	91.240.000	APBD Kabupaten	
1	01	2	08		5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran Hasil : Persentase pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah		100 % 100 %	220.684.300	APBD Kabupaten	220.683.000		100 % 100 %	226.034.809	APBD Kabupaten	
1	01	2	08	01	Sub Kegiatan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Tanjungpandan	12 laporan	3.000.000	APBD Kabupaten	3.000.000		12 laporan	3.000.000	APBD Kabupaten	
1	01	2	08	02	Sub Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Tanjungpandan	12 laporan	51.600.000	APBD Kabupaten	51.600.000		12 laporan	56.951.809	APBD Kabupaten	
1	01	2	08	04	Sub Kegiatan 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Jumlah laporan penyediaan jasa layanan umum kantor yang disediakan	Tanjungpandan	12 laporan	166.084.300	APBD Kabupaten	166.083.000		12 laporan	166.083.000	APBD Kabupaten	
						4. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		100 %					100 %			
1	01	2	07		6. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Jenis barang milik daerah Hasil : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		22 Jenis 100 %	0	APBD Kabupaten	2.398.358.400		25 Jenis 100 %	3.063.340.400	APBD Kabupaten	
1	01	2	07	02	Sub Kegiatan 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Tanjungpandan	0 Unit	0	APBD Kabupaten	-		0 Unit	0	APBD Kabupaten	
1	01	2	07	05	Sub Kegiatan 2 Pengadaan Mebel	Keluaran : Jumlah paket mebel yang disediakan	Tanjungpandan	1 Unit	0	APBD Kabupaten	-		113 Unit	188.982.000	APBD Kabupaten	Foling kabinet 10, lemari arsip 5, meja sth biro 10, kursi kerja 10, kursi ruang tunggu pelayanan 5, kursi tamu 2, kursi menyusui 1, tempat tidur rumah pelayanan 10 unit, meja ruang rapat 10, kursi rapat 50)
1	01	2	07	06	Sub Kegiatan 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Tanjungpandan	3 Unit	0	APBD Kabupaten	-		53 Unit	476.000.000	APBD Kabupaten	AC 1/2 PK 6 unit, ac 2 PK 1 unit, PC 10 unit, laptop 7 unit, printer epson 7 unit, printer canon 6 unit, mesin scanner f4 2 unit, kipas angin 5 unit, mesin chainsaw 2 unit, camera canon 1 unit, mesin antrian 1 unit, cctv 1 set, infocus 2 unit, layar infocus 2 unit)
1	01	2	07	09	Sub Kegiatan 4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Tanjungpandan	0 Unit	0	APBD Kabupaten	-		0 Unit	0	APBD Kabupaten	
1	01	2	07	10	Sub Kegiatan : 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Tanjungpandan	0 Unit	0	APBD Kabupaten	2.398.358.400		1 Unit	2.398.358.400	Insentif Fiskal 2023	Sudah terdapat dalam DPA Induk 2023
1	01	2	09		7. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Barang milik daerah dalam kondisi baik Hasil : Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		6 Jenis 100 %	178.390.000	APBD Kabupaten	177.789.922		6 Jenis 100 %	234.504.922	APBD Kabupaten	

1	01	2	09	01	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran : Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		Tanjungpandan	2 Unit	46.000.000	APBD Kabupaten	46.000.000		2 Unit	46.000.000	APBD Kabupaten	
1	01	2	09	02	Sub Kegiatan	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		Tanjungpandan	24 Unit	87.750.000	APBD Kabupaten	87.750.000	24 (roda 4 3 unit, roda 2 12 unit, perahu dolpin plus mesin 2, mobil truk 1 unit, trailer alat angkut perahu dolpin 2 buah, mesin dolpin 2, mobil dapur umum 1 unit, mobil tangki air 1 unit)	18 Unit	141.215.000	APBD Kabupaten	nambah unit kendaraan yg ada, mobil 3 unit, motor 12 unit, roda 6 3 unit
1	01	2	09	05	Sub Kegiatan	3. Pemeliharaan Mebel	Keluaran : Jumlah mebel yang dipelihara		Tanjungpandan	10 Unit	3.000.000	APBD Kabupaten	3.000.000		10 Unit	3.000.000	APBD Kabupaten	
1	01	2	09	06	Sub Kegiatan	4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		Tanjungpandan	25 Unit	21.640.000	APBD Kabupaten	21.040.000		38 Unit	24.290.000	APBD Kabupaten	penambahan pemeliharaan printer 5 unit
1	01	2	09	09	Sub Kegiatan	5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan rehabilitasi		Tanjungpandan	1 Unit	20.000.000	APBD Kabupaten	19.999.922		1 Unit	19.999.922	APBD Kabupaten	
1	01	2	09		Sub Kegiatan	6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Tanjungpandan	0 Unit	0	APBD Kabupaten	-		0 Unit	0	APBD Kabupaten	
Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
1	01	02			1. Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial			100 %	327.909.035		327.882.043		100 %	600.049.043		
1	01	02	2.01		1. Kegiatan	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah (PSKS) Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah PSKS yang aktif Hasil : Kearukatan Data (capaian 2020 = 70%)			165 PSKS 100 %	327.909.035	APBD Kabupaten	327.882.043		165 PSKS 100 %	600.049.043	APBD Kabupaten	
1	01	02	2.01	01	Sub Kegiatan	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota		Kabupaten Belitung	81 orang	159.905.985	APBD Kabupaten	159.901.968		81 orang	159.901.968	APBD Kabupaten	
1	01	02	2.01	02	Sub Kegiatan	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota		Kabupaten Belitung	20 Keluarga	79.356.500	APBD Kabupaten	79.346.115		17 Keluarga	224.346.115	APBD Kabupaten	145/100 DED dan 45 perjalanan dinas usulan keluarga has Hanandjoedin (Mahardjito)
1	01	02	2.02	03	Sub Kegiatan	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota		Kabupaten Belitung	6 Lembaga	0	APBD Kabupaten	-		6 Lembaga	127.167.000	APBD Kabupaten	kegiatan bulan bakti karang taruna
1	01	02	2.02	04	Sub Kegiatan	4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Keluaran : Jumlah sertipikat yang dari hasil peningkatan sumberdaya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota		Kabupaten Belitung	1 Sertifikat	88.646.550	APBD Kabupaten	88.633.960		1 Sertifikat	88.633.960	APBD Kabupaten	
1	01	03			2. Program	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar serta Gepeng diluar panti yang mendapat layanan rehabilitasi sosial			100 %	514.588.560		496.247.420		100 %	491.244.420		
1	01	03	3.01		1. Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Keluaran : Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial Hasil : Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti			105 orang 100 %	423.466.170	APBD Kabupaten	423.364.670		105 orang 100 %	405.364.670	APBD Kabupaten	

1	01	03	3.01	01	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Permakanaan	Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Belitung	105 orang	215.789.700	APBD Kabupaten	215.740.750	105 orang	215.740.750	APBD Kabupaten	
1	01	03	3.01	01	Sub Kegiatan	2 Penyediaan Alat Bantu	Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Belitung	0 orang	0	APBD Kabupaten	-	0 orang	0	APBD Kabupaten	
1	01	03	3.01	01	Sub Kegiatan	3 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Belitung	105 orang	141.037.800	APBD Kabupaten	141.020.250	105 orang	123.020.250	APBD Kabupaten	tanaga honor ada yg berhenti, sebagian didalihkan ke SPPD
1	01	03	3.01	01	Sub Kegiatan	4 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluaran : Jumlah peserta bimbingan fisik mental spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Belitung	5 orang	66.638.670	APBD Kabupaten	66.603.670	5 orang	66.603.670	APBD Kabupaten	
1	01	03	3.01		2. Kegiatan	: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Keluaran : Persentase PMKS lainnya yang menerima layanan Rehabilitasi Hasil : Terpenuhinya layanan rehabilitasi sosial PMKS lainnya di luar panti	Kabupaten Belitung	100 % 100 %	91.122.390	APBD Kabupaten	72.882.750	100 % 100 %	85.879.750	APBD Kabupaten	
1	01	03	3.01	01	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Permakanaan	Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Belitung	12 orang	19.930.000	APBD Kabupaten	6.909.750	18 orang	9.906.750	APBD Kabupaten	penambahan pemakanan untuk orang yang diterlantarkan keluarga
						2. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan kabupaten/kota	Tanjungpandan	12 orang	16.693.950	APBD Kabupaten	16.500.000	12 orang	16.500.000	APBD Kabupaten	
						3 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	Tanjungpandan	12 orang	54.498.440	APBD Kabupaten	49.473.000	18 orang	59.473.000	APBD Kabupaten	penambahan akomodasi
1	01	03			3 Program	: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	Kabupaten Belitung	100 %	341.561.650		497.094.362	100 %	581.844.362		
1	01	03	3.01		1. Kegiatan	: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi Hasil : Data dan Informasi orang tidak mampu dan PMKS yang akurat		100 % 100 %	341.561.650	APBD Kabupaten	497.094.362	100 % 100 %	581.844.362	APBD Kabupaten	
1	01	03	3.01	01	Sub Kegiatan	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	Kabupaten Belitung	8682 keluarga	341.561.650	APBD Kabupaten	340.678.650	7895 keluarga	425.428.650	APBD Kabupaten	84.750.000 penambahan honor PSM (pekerja sosial masyarakat dan TKS) 12 bulan sebelum hanya 9
1	01	03	3.01	02	Sub Kegiatan	2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Keluaran : Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Belitung	10 keluarga	0	APBD Kabupaten	156.415.712	10 keluarga	156.415.712	Insentif Fiskal 2023	Sudah masuk dalam DPA Induk 2023
1	01	03			4 Program	: PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100 %	445.395.900		444.430.180	100 %	444.430.180		
1	01	03	3.01		1. Kegiatan	: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Keluaran : Korban bencana yang menerima bantuan permakanaan Hasil : Terlayannya korban bencana	Kabupaten Belitung	100 % 100 %	0		-	100 % 100 %	0		
1	01	03	3.01	01	Sub Kegiatan	1. Penyediaan Makanan	Keluaran : Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	Tanjungpandan	0 orang	0		-	0 orang	0		
1	01	03	3.01		2. Kegiatan	: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan	Keluaran : Korban bencana yang menerima bantuan sosial Hasil : Terlayannya korban bencana	Kabupaten Belitung	100 % 100 %	445.395.900	APBD Kabupaten	444.430.180	100 % 100 %	444.430.180	APBD Kabupaten	

1	01	03	3.01	01	Sub Kegiatan	1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Keluaran : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjungpandan	45 Orang	445.395.900	APBD Kabupaten	444.430.180	45 Orang	444.430.180	APBD Kabupaten
1	01	03			5 Program	: PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Taman Makam Pahlawan yang tertata		100 %	87.000.000		86.975.400	100 %	86.975.400	
1	01	03	3.01		1. Kegiatan	: Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran : Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan Hasil : Terpeliharanya taman makam pahlawan		100 % 100 %	87.000.000	APBD Kabupaten	86.975.400	100 % 100 %	86.975.400	APBD Kabupaten
					Sub Kegiatan	: 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Keluaran : Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharaannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	Tanjungpandan	54 makam	87.000.000		86.975.400	55 makam	86.975.400	
1					Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN									
1	02				Bidang Urusan	: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN									
					Tujuan	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		47				47		
					Sasaran	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan		5,1				5,1		
1	02	16			6 Program	: PROGRAM PENGARUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada belanja langsung APBD		0,50 %	457.555.075		457.383.073	0,50 %	457.383.073	
					1 Kegiatan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kebijakan PUG Hasil : Terlaksananya Kebijakan PUG	Kabupaten Belitung	10 SKPD	34.604.850		34.547.070	10 SKPD	34.547.070	
					Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Keluaran : Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender PUG kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Belitung	1 dokumen	18.800.050		18.758.590	1 dokumen	18.758.590	
					Sub Kegiatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Keluaran : Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Belitung	35 perangkat daerah	15.804.800		15.788.480	35 perangkat daerah	15.788.480	
					2 Kegiatan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluaran : Terfasilitasinya Organisasi perempuan Hasil : Meningkatnya peran perempuan dalam bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi		19 Organisasi 100 %	408.621.575		408.542.995	19 Organisasi 100 %	408.542.995	
					Sub Kegiatan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Keluaran : Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Belitung	1 dokumen	17.721.500		17.684.400	1 dokumen	17.684.400	
					Sub Kegiatan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Keluaran : Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Kabupaten Belitung	19 organisasi	390.900.075		390.858.595	19 organisasi	390.858.595	
1	02	16	16.01	3	1. Kegiatan	: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Keluaran : Terfasilitasinya Forum Puspka Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung	1 Lembaga	14.328.650	APBD Kabupaten	14.293.008	1 Lembaga	14.293.008	APBD Kabupaten

			2. Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan Mutu Anak Kalimantan Kabupaten Kutai	Kawasan	Terdokumentasi secara baik	Kabupaten Belitang	1	Dikawatir												
02	10.01	01	Sub Kegiatan	2. Sosialisasi dan Implementasi Kebijakan Mutu Anak Kalimantan Kabupaten Kutai	Kawasan	Terdokumentasi secara baik	Kabupaten Belitang	1	Dikawatir											
02	10.01	01	Sub Kegiatan	3. Pengembangan Kurikulum, Instrumen dan Teknik Penilaian Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Pengabdian Masyarakat Tingkat Dasar Kabupaten Kutai	Kawasan	Terdokumentasi secara baik	Kabupaten Belitang	610	Puas											
02	10.01		Sub Kegiatan	Perwujudan Forum atau Lembaga Penyedia Layanan Pengabdian Masyarakat Tingkat Dasar Kabupaten Kutai	Kawasan	Jumlah dokumen hasil kegiatan forum atau lembaga penyedia layanan pengabdian masyarakat tingkat dasar yang terdokumentasi secara baik	Kabupaten Belitang	1	Dikawatir	176.002.770		171.241.813		1	Dikawatir	112.226.021			Dokumen yang tidak ada pengabdian SPED	
02	10.01		14. Program	1. PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	Persepsi anak korban kekerasan yang ditangani melalui rumah keluarga			100 %		71.513.402		71.977.869		100 %		65.289.679				
02	10.01		2. Kegiatan	Perwujudan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memenuhi Perlindungan Khusus Tingkat Dasar Kabupaten Kutai	Kawasan Uraian	Terdokumentasi secara baik & sesuai Data Kabupaten Kutai Memenuhi tujuan perlindungan anak & tingkat Dasar Kabupaten Kutai	Kabupaten Belitang	100 % 100 %		71.129.623		71.317.069		100 % 100 %		63.928.029				
02	10.01	01	Sub Kegiatan	1. Layanan dan Sosialisasi Pengabdian Masyarakat Tingkat Dasar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memenuhi Perlindungan Khusus tingkat dasar Kabupaten Kutai	Kawasan	Jumlah dokumen hasil kegiatan dan sosialisasi pengabdian masyarakat melalui lembaga penyedia layanan anak yang memenuhi perlindungan khusus kewenangan Kabupaten Kutai	Kabupaten Belitang	1	Dikawatir	71.227.473		71.317.069		1	Dikawatir	67.128.029			Dokumentasi UPD-kanon	
02	10.01	01	Sub Kegiatan	2. Sosialisasi dan Implementasi Program Kerja atau Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memenuhi Perlindungan Khusus Tingkat Dasar Kabupaten Kutai	Kawasan	Jumlah dokumen hasil sosialisasi dan implementasi program kerja atau lembaga penyedia layanan anak yang memenuhi perlindungan khusus kewenangan Kabupaten Kutai	Kabupaten Belitang	1	Dikawatir					1	Dikawatir	0				
				Jumlah						7.042.106.000		18.276.770				11.226.216.000				





**PERUBAHAN PERUBAHAN KINERJA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KASIMIN, S.IP, MAB**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **H. SAHANI SALEH, S.Sos**

Jabatan : **BUPATI BELITUNG**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpandan, 14 November 2023

Pihak Kedua,
BUPATI BELITUNG,

H. SAHANI SALEH, S.Sos

Pihak Kesatu,
KEPALA DINAS,

KASIMIN, S.IP, MAB
Pembina Utama Muda
NIP. 196908241990031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BELITUNG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase penurunan PMKS pertahun	0,50
2	Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase (%) PMKS yang tertangani	80%
3	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	47,00
4	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	5,10
5	Terpenuhinya Hak Anak	KLA (Kabupaten Layak Anak)	Pratama (85%)
6	Meningkatnya kualitas hidup anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	4,4

Program		Anggaran	Keterangan
A.	Pemberdayaan Sosial	Rp. 408.808.768	APBDP
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 408.808.768	APBDP
B.	Rehabilitasi Sosial	Rp. 472.694.420	APBDP
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp. 386.814.670	APBDP
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp. 85.879.750	APBDP
C.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 738.336.850	APBDP & Insentif Fiskal 2023
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 738.336.850	APBDP & Insentif Fiskal 2023
D.	Penanganan Bencana	Rp. 444.430.180	APBDP
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Rp. 444.430.180	APBDP
E.	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 86.975.400	APBDP
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	Rp. 86.975.400	APBDP
F.	Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 517.180.698	APBDP
1	Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 34.547.070	APBDP
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 468.340.620	APBDP
3	Pengustan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp. 14.293.008	APBDP
G.	Perlindungan Perempuan	Rp. 103.865.803	APBDP

1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	103.865.803	APBDP
H.	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	42.703.164	APBDP
1	Pengumpulan, Pengelolaan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	42.703.164	APBDP
I.	Pemenuhan Hak Anak (PIHA)	Rp.	173.203.252	APBDP
1	Pelembagaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	12.046.619	APBDP
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	Rp.	161.156.633	APBDP
J.	Perlindungan Khusus Anak	Rp.	65.328.034	APBDP
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	65.328.034	APBDP
K.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.869.294.732	APBDP
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	5.999.818	APBDP
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.713.920.681	APBDP
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	284.286.102	APBDP
4	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	2.429.358.400	APBD P & Insentif Fiskal 2023
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	226.034.809	APBDP
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	209.694.922	APBDP
JUMLAH		Rp.	10.922.821.301	



BUPATI
BUPATI BELITUNG,
H. SALAHUDIN ALEH, S.Sos

Tanjungpandan, 14 November 2023
 KEPADA DINAS

KASIMIN, S.IP, MAB
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196908241990031004

FORM 2 : PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

1. Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan 1. "Meningkatnya Kesejahteraan PMKS" ; Sasaran Strategis Ke 1. "Meningkatnya penanganan PMKS"

No.	Indikator Kinerja	Jenis Target (Kuantitatif/K	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknis Perhitungan	Kinerja		Ket.
							Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10
1	Persentase penurunan PMKS per tahun	Kualitatif	0.5	(Jumlah PMKS Tahun n-1 - Jumlah PMKS Tahun n) / Jumlah PMKS Tahun n-1 x 100%	Tabel Jenis PMKS tahun 2022 dan Triwulan IV 2023	$= (14.686 - 11986) / 14.686 \times 100\% = 2.700 / 14.686 \times 100\% = 18,39$	18,39	3.678,00	Eselon II (Indikator IKU)
2	Persentase PMKS yang tertangani	Kuantitatif	80%	= Jumlah PMKS yang tertangani / Jumlah PMKS x 100%	Tabel Jenis PMKS yang menerima bantuan dan yang seharusnya menerima bantuan sd. Triwulan IV tahun 2023	$= 11.781 / 11.986 \times 100\% = 98,29\%$	98,29	122,86	Eselon II (Indikator IKU)
1	Persentase Penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	Kuantitatif	100%	(Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti/jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lansia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti)x100%	Data kinerja dari bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial (Data SPM triwulan IV tahun 2023)	$= (30 + 15 + 60) / 105 * 100 = 100\%$	100%	100,00	Eselon III (Indikator Program)
1.1	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan gelandangan yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial	Kuantitatif	105 orang	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, dan Gelandangan yang mendapatkan Rehabilitas sosial	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	105 orang	100,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	105 Orang	Jumlah lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai standar gizi minimal	Data Kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	105 orang	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/ kota	Kuantitatif	105 orang	Jumlah lansia terlantar, disabilitas terlantar, anak terlantar yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	105 orang	100,00	
3	Jumlah peserta bimbingan fisik mental spiritual dan sosial kewenangan	Kuantitatif	5 orang	Jumlah peserta bimbingan fisik mental spiritual dan sosial	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	-	8 Orang	160,00	
1.2.	Persentase PMKS lainnya yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial	Kuantitatif	100%	Jumlah PMKS lainnya yang menerima layanan dibagi jumlah PMKS lainnya (pemerlu pelayanan) dikali 100%	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	$= 39/ 39 \times 100\% = 100\%$	100,00	100,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	18 orang	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/ Kota	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	39 orang	39 orang	216,67	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	12 orang	Jumlah PMKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan kesehatan di luar panti	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	39 orang	39 orang	325,00	

	3	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	18 orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	39 Orang	39 orang	216,67	
	2	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial	Kuantitatif	100%	(Jumlah penerima program pemberdayaan sosial_ KK/ Jumlah Penduduk Miskin_ KK) x 100%	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	= 7535/19519 x 100% = 38,60%	38,60	38,60	Eselon III (Indikator Program)
	2,1	Jumlah PSKS yang aktif	Kuantitatif	165 PSKS	Jumlah PSKS aktif ditingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	-	164 PSKS	99,39	Eselon III (Indikator Kegiatan)
	1	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kualitatif	81 orang	Jumlah tenaga kesejahteraan sosial, pendamping BPNT, dan pendamping PKH terfasilitasi	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	-	81 orang	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	2	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitas kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	17 Keluarga	Jumlah penerima penghargaan kepada veteran / pejuang	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	-	17 Keluarga	100,00	
	3	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	6 Lembaga	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	-	6 Lembaga	100,00	
	4	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumberdaya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan	Kuantitatif	1 Sertifikat	Jumlah sertifikat SDM/ Lembaga LK3	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	-	1 Sertifikat	100,00	
	3	Terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial	Kuantitatif	100%	(Jumlah penerima perlindungan dan jaminan sosial (PBI) / Jumlah Jiwa dalam DTKS) x 100 %	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	= 40652 / 46032 x 100% = 88,31%	88,31	88,31	Indikator Eselon III (Indikator Program)
	3,1	Data dan informasi orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi	Kuantitatif	100%	Jumlah data orang tidak mampu dan PMKS yang tervalidasi dibagi jumlah DTKS dikali 100%	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	= (106+8+290+148+548+761+411+644+7530+7110+866+1182+748) / 46032 x 100% = 20352/4032 x 100% = 44,21%	44,21	44,21	Eselon III (Indikator Kegiatan)
	1	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengetasan fakir miskin Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	7895 keluarga	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengetasan fakir miskin Kabupaten/ Kota	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	Penerima bantuan dari pusat	7535 Keluarga	95,38	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	2	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	Kuantitatif	10 Keluarga	Jumlah KPM yang mendapatkan bantuan sosial / Jumlah keluarga sasaran dikali 100%	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	Proses penerbitan Perbup, Kepbup	7 Keluarga	70,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan) _ Sumber Dana : Insentif Fiskal 2023)
	4	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat setelah tanggap darurat bencana	Kuantitatif	100%	(Jumlah korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten yang terpenuhi kebutuhan dasarnya/Populasi korban bencana alam dan sosial kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten)x100%	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	= 24/24 x 100% = 100%	100,00	100,00	Eselon III (Indikator Program)
	4,1	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	Kuantitatif	100%	Korban bencana yang menerima bantuan sosial	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	Jumlah korban bencana sosial	100,00	100,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
	1	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/ kota	Kuantitatif	45 orang	Jumlah orang yang melaksanakan Koodinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	Data kinerja bidang rehabilitasi dan perlindungan sosial	Jumlah anggota tagana 2023	45 orang	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

5	Taman Makam Pahlawan yang tertata	Kuantitatif	100%	Taman Makam Palawan yang Tertata / Taman Makam Pahlawan yang ada x 100%	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	$=1/1*100\%=100\%$	100,00	100,00	Eselon III (Indikator Program)
5,1	Terlaksananya pengelolaan taman makam pahlawan	Kuantitatif	100%	Jumlah TMP yang dipelihara di bagi jumlah seluruh TMP	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	$=1/1*100\% = 100\%$	100,00	100,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/ kota	Kuantitatif	55 makam	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota	Data kinerja bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin	-	55 Makam	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

2. Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan ke 2. "Terwujudnya peningkatan kualitas hidup perempuan" ; Sasaran Strategis Ke 2. "Meningkatnya kualitas hidup perempuan"

No.	Indikator Kinerja	Jenis Target (Kuantitatif/K)	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknis Perhitungan	Kinerja		Ket.
							Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Kualitatif	47%	Persentase perempuan di Parlemen Pegawai, Pegawai Senior, Manager dan Pekerja Profesional dan Teknis	Data yang ada yang bersumber dari beberapa instansi	Data IDG Menggunakan data IDG Tahun 2022	53,42	113,66	Eselon II (IKU)
2	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan	Kuantitatif	5,1%	Rasio Perempuan Korban Kekerasan Perempuan = ((Jumlah korban kekerasan) / (jumlah penduduk perempuan > 18 tahun)) x 10.000	Data yang ada bersumber dari berbagai instansi. Data Capil : Jumlah Penduduk Semester Tahun 2023. Jumlah korban kekerasan perempuan 49 (11 anak perempuan dan 38 dewasa perempuan)	$= 49 / 93.404 \times 10.000 = 5,25$	5,25	102,94	Eselon II (IKU)
1	Persentase ARG pada belanja langsung ARG	Kuantitatif	0,5%	(Jumlah anggaran yang serponsive gender seluruh PD / Jumlah belanja operasional dan belanja modal APBD) x 100%	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	$= 536.418.495.812 / 1.106.527.840.359 \times 100\% = 48,48\%$	48,48	9696%	Eselon III (Indikator Program)
1,1	Lembaga Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kebijakan PUG	Kuantitatif	10 PD	Jumlah Lembaga Pemerintahan Daerah yang melaksanakan kebijakan PUG	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	16 PD	160	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pengarusutamaan gender PUG kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 Dok	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	35 PD	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	31 PD	88,57	
1,2	Terfasilitasinya organisasi perempuan	Kuantitatif	19 Organisasi	Jumlah Organisasi Perempuan	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	19 Organisasi	100,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 Dok	100,00	

	2	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	19 Organisasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan fasilitasi kelembagaan perempuan	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	19 Organisasi	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
1,3		Kelembagaan PUG	Kuantitatif	1 Lembaga	Jumlah lembaga penyedia layanan	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 Lembaga	100,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
	1	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	Kuantitatif	1 Lembaga	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan pendampingan	Data kinerja bidang PUG dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 Lembaga	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	2	Persentase layanan perlindungan perempuan	Kuantitatif	100%	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan perlindungan / Jumlah korban kekerasan yang melapor x 100%	Data kinerja bidang perlindungan perempuan dan anak (jumlah korban kekerasan perempuan terdiri dari 11 anak perempuan dan 38 dewasa perempuan)	= 49/49 x 100% = 100%	100%	100,00	Eselon III (Indikator Program)
	2.1.	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	Kuantitatif	3 Lembaga	Jumlah lembaga yang terfasilitasi	Data kinerja bidang perlindungan perempuan dan anak	-	3 Lembaga	100,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
	1	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Kuantitatif	40 orang	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Data kinerja bidang perlindungan perempuan dan anak	-	49 orang	122,50	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
	3	Persentase pemenuhan data dan sistem informasi gender dan anak	Kuantitatif	25%	(Komponen data gender dan anak yang terpenuhi / Jumlah komponen data SIGA) x 100%	Data Kinerja bidang PUGPP dan Pemberdayaan Perempuan	=45/60*100 = 75%	75%	300,00	Eselon III (Indikator Program)
	3,1	Tersedianya data gender dan anak	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah data gender dan anak	Data Kinerja bidang PUGPP dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 Dok	100,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
	1	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	Data Kinerja bidang PUGPP dan Pemberdayaan Perempuan	-	1 Dok	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

3. Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan ke-3. "Terpenuhinya Hak Anak" ; Sasaran Strategis ke 3. "Meningkatnya kualitas hidup anak"

No.	Indikator Kinerja	Jenis Target (Kuantitatif/K)	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknik Perhitungan	Kinerja		Ket.
							Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10
1	Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kualitatif	Pratama (85%)	KLA ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak	Data yang ada yang bersumber dari beberapa instansi	Penghargaan dari Kementerian PPA RI, Kabupaten Belitung meraih KLA Madya (skor 601 - 700) >> Target KLA Pratama 85% x 600 = 510 point >> maka realisasi = capaian / target x 100 = 601/510 x 100 = 117,84%	Madya (601 - 700)	117,84	Eselon II

2	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Kualitatif	4,4	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus = ((Jumlah anak yang memerlukan perlindungan) / (jumlah anak)) x 10.000 (Anak yang memerlukan perlindungan adalah : anak korban kekerasan, anak dengan disabilitas, dan anak yang berhadapan dengan hukum)	Data yang ada yang bersumber dari beberapa instansi	= (13+57+4) / 52.076 x 10.000 = 74/57042 x 10000 = 12,97	12,97	294,77	Eselon II
1	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kualitatif	Pratama	Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Data bersumber dari Kementerian PPA yang Menetapkan status KLA ;	Kabupaten Belitung memperoleh predikat Madya dari Kementerian PPA RI	Madya (601 - 700)	100,00	Eselon III (Indikator Program)
1.1.	Tercapainya peningkatan status KLA	Kualitatif	750 Point	Jumlah Skor status KLA Pratama	Data bersumber dari Kementerian PPA yang Menetapkan status KLA ;	Kabupaten Belitung meraih KLA Madya (skor 601 - 700)	601	80,13	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelebangan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebangan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan kabupaten/Kota	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1 Dok	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
1.2.	Terfasilitasinya forum anak Kabupaten Belitung	Kuantitatif	1 Dok	Laporan Fasilitasi Forum anak Kabupaten Belitung	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1 Dok	100,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Kuantitatif	1 Dok	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	-	1 Dok	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi Terkait Kabupaten	Kuantitatif	100%	(Jumlah korban kekerasan anak yang terlayani / Jumlah korban kekerasan yang tercatat) x 100%	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	= 13/13* 100 = 100%	100	100,00	Eselon III (Indikator Program)
2.1.	Tersedianya layanan perlindungan anak di tingkat Desa/ Kelurahan	Kuantitatif	100%	Jumlah layanan perlindungan anak ditingkat Desa/ kelurahan dibagi Jumlah Desa/ Kelurahan dikali 100%	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak		100	100,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Kuantitatif	1 Dok	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	Data dari Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak		1 Dok	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

Pengukuran Indikator Kinerja Tujuan. "Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas" ; Sasaran Strategis "Meningkatnya kualitas pelayanan daerah"

No.	Indikator Kinerja	Jenis Target (Kuantitatif/K)	Target	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Data Kinerja	Teknik Perhitungan	Kinerja		Ket.
							Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 8/4	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kualitatif	100	SKM = (Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi) x 100%	Survey kepuasan dari masyarakat dan selanjutnya dikumpulkan ke bagian organisasi Setda Kabupaten Belitung	Survey kepuasan dari masyarakat dan selanjutnya dikumpulkan ke bagian organisasi Setda Kabupaten Belitung	89,22	89,22	Eselon II

2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kualitatif	100	SKM = (Total dari nilai persepsi per unsur / Total unsur yang terisi) x 100%	Survey kepuasan dari masyarakat dan selanjutnya dikumpulkan ke bagian organisasi Setda Kabupaten Belitung	Survey kepuasan dari masyarakat dan selanjutnya dikumpulkan ke bagian organisasi Setda Kabupaten Belitung	89,22	89,22	Eselon II
1	Persentase dokumen perencanaan penganggaran, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	Kualitatif	100	Persentase kualitas pelayanan perkantoran	Persentase dokumen yang telah dilaporkan dibagi persentase keseluruhan	Persentase dokumen yang telah dilaporkan dibagi persentase keseluruhan	100	100,00	Eselon III (Indikator Program)
1.1.	Dokumen hasil perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kualitatif	6 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen perencanaan terdiri dari renstra, renja induk, renja perubahan; dokumen pelaporan terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ	Dokumen perencanaan terdiri dari renstra, renja induk, renja perubahan; dokumen pelaporan terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ	6 Dok	50,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kuantitatif	3 Dok	Dokumen perencanaan perangkat daerah	Terdiri dari Renstra, Renja Induk dan Renja Perubahan	Terdiri dari Renstra, Renja Induk dan Renja Perubahan	3 Dok	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kuantitatif	3 Laporan	Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ	Terdiri dari LAKIP, LPPD, LKPJ	3 Laporan	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
1.2.	Dokumen keuangan perangkat daerah	Kuantitatif	3 Dok	Jumlah dokumen keuangan perangkat daerah	Persentase dokumen keuangan yang telah selesai di laporkan	Persentase dokumen keuangan yang telah selesai dilaporkan	3 Dok	100,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Kuantitatif	28 Orang	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Data gaji dan tunjangan pegawai sampai TW IV 2023	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan	28 Orang	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kuantitatif	2 Dok	Dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Dokumen terdiri dari laporan keuangan, laporan barang	dokumen terdiri dari laporan keuangan, laporan barang	2 Dok	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Kuantitatif	75%	Persentase kualitas pelayanan perkantoran	Dokumen penilaian Indeks Profesionalitas ASN diperoleh dan dibagikan oleh BKPSDM setiap tahunnya		78,70	104,93	Eselon III (Indikator Program)
3	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	Kuantitatif	100%	Persentase kualitas pelayanan perkantoran	Pelayanan administrasi umum perkantoran dan administrasi jasa pelayanan umum perkantoran		100	100,00	Eselon III (Indikator Program)
3.1.	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Kuantitatif	100%	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum, sub kegiatan rutin sekretariat	Administrasi umum, sub kegiatan rutin sekretariat	100	100,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kuantitatif	1 Paket	Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Data realisasi fisik sd. Desember 2023		1 Paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kuantitatif	2 Paket	Paket peralatan dan perlengkapan kantor	Data realisasi fisik sd. Desember 2023		2 Paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
3	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kuantitatif	1 paket	Peralatan rumah tangga	Data realisasi fisik sd. Desember 2023		1 paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
4	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	Kuantitatif	2 Paket	Bahan logistik kantor	Data realisasi fisik sd. Desember 2023		2 Paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
5	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kuantitatif	1 paket	Barang cetakan dan penggandaan	Data realisasi fisik sd. Desember 2023		1 paket	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
6	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Kuantitatif	1 Dok	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Data realisasi fisik sd. Desember 2023		1 Dok	100	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

7	koordinasi dan konsultasi SKPD	Kuantitatif	12 Laporan	Kepat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Data realisasi fisik sd. Desember 2023		12 Laporan	100,00	Eselon III (Indikator Sub Kegiatan)
3.2	Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Kuantitatif	100%	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Data realisasi fisik sd. Desember 2023	Realisasi fisik 2023	100%	100,00	Eselon III Pendahuluan Kegiatan
1	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kuantitatif	12 Laporan	Jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat, material, perangka, dan pengiriman		12 Laporan	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kuantitatif	12 Laporan	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		12 Laporan	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
3	Jumlah laporan jasa layanan umum kantor yang disediakan	Kuantitatif	12 Laporan	Jasa layanan umum kantor	Tenaga Non ASN Cleaning Service, Sopir dan Penjaga Malam		12 Laporan	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
4	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Kuantitatif	100%	Persentase kualitas pelayanan perkantoran			100%	100,00	Eselon III (Indikator Program)
4.1	Jenis barang milik daerah	Kuantitatif	2 Jenis	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung kantor			2 Jenis	100,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kuantitatif	4 unit	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			4 Unit	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kuantitatif	1 unit	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan			1 Unit	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
4.2	Barang milik daerah dalam kondisi baik	Kuantitatif	6 Jenis	Jumlah Barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Barang milik daerah dalam kondisi baik	6 Jenis	100,00	Eselon III (Indikator Kegiatan)
1	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kuantitatif	2 Unit	Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	2 Unit	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
2	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perawatannya	Kuantitatif	18 Unit	Kendaraan dinas roda 2, 3, 4, atau lebih yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas roda 2, 3, 4, atau lebih yang dipelihara	Kendaraan dinas roda 2, 3, 4, atau lebih yang dipelihara	18 unit	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
3	Jumlah mebel yang dipelihara	Kuantitatif	10 Unit	Mebel yang dipelihara	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
4	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kuantitatif	33 Unit	Peralatan dan mesin yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	26 Unit	28,78	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)
5	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	Kuantitatif	1 Unit	Gedung kantor, bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah Gedung kantor, bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah Gedung kantor, bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	100,00	Eselon IV (Indikator Sub Kegiatan)

8 Januari 2024
 Kepala Dinas PPA
 Kabupaten Pangkep
 PPA
 NIP. 196301241900211004

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD TAHUN 2023
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG
PERIODE BULAN 31 DESEMBER 2023

NO	NAMA PROGRAM	NAMA KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA PAKET PEKERJAAN	FLAFOND ANGGARAN (APBD)		DATA KONTRAK					REALISASI			SISA ANGGARAN		LOKASI KEGIATAN	KET
				INDUK (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	SWAKELOLA (PENYEDIA)	KONTRAK AWAL (PENYEDIA, NOMOR, TGL)	KONTRAK PERUBAHAN (PENYEDIA, NOMOR, TGL)	NILAI KONTRAK (Rp)	NILAI AMANDEMENT (Rp)	KEUANGAN (Rp)	KEU (%)	FISIK (%)	RUPIAH	(%)		
1	2	3	4	10	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			7.659.568.146	7.869.294.732	-	-	-	7.869.294.732	-	7.366.615.043	93,61	96,67	502.679.689	26,38		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5.999.818	5.999.818	-	-	-	5.999.818	-	4.696.400	78,28	100,00	1.303.418	21,72		
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	3.000.000	-	3.000.000	100,00	100,00	-	0,00		
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.999.818	2.999.818	Swakelola (Penyedia)	-	-	2.999.818	-	1.696.400	56,55	100,00	1.303.418	43,45		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.594.184.706	4.713.920.681				4.713.920.681	-	4.513.577.903	95,75	100,00	200.342.778	23,84		
3		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.591.184.888	4.710.920.863	Swakelola	-	-	4.710.920.863	-	4.511.881.503	95,77	100,00	199.039.360	4,23		
4		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.999.818	2.999.818	Swakelola (Penyedia)	-	-	2.999.818	-	1.696.400	56,55	100,00	1.303.418	43,45		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		262.552.300	284.286.102				284.286.102		261.667.550	92,04	100,00	22.618.552	6,47		
5		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000	7.000.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	7.000.000	-	6.966.000	99,51	100,00	34.000	0,49		
6		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.747.200	52.747.200	Swakelola (Penyedia)	-	-	52.747.200	-	52.433.300	99,40	100,00	313.900	0,60		
7		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.000.000	14.000.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	14.000.000	-	13.961.000	99,72	100,00	39.000	0,28		
8		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	101.105.100	101.105.100	Swakelola (Penyedia)	-	-	101.105.100	-	93.838.800	92,81	100,00	7.266.300	7,19		
9		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.700.000	40.700.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	40.700.000	-	25.788.300	63,36	100,00	14.911.700	36,64		
10		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.760.000	5.760.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	5.760.000	-	5.760.000	100,00	100,00	-	0,00		
11		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41.240.000	62.973.802	Swakelola (Penyedia)	-	-	62.973.802	-	62.920.150	99,91	100,00	53.652	0,09		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.398.358.400	2.429.358.400				2.429.358.400	-	2.223.962.400	91,55	100,00	205.396.000	8,45		
12		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						31.000.000		30.810.000	99,39	100,00	190.000	0,61		
12		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.398.358.400	2.429.358.400	Swakelola (Penyedia)			2.429.358.400	-	2.193.152.400	90,28	100,00	236.206.000	9,72		
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		220.683.000	226.034.809				226.034.809		220.915.780	97,74	100,00	5.119.029	27,55		
13		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	3.000.000	-	660.000	22,00	100,00	2.340.000	78,00		
14		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.600.000	56.951.809	Swakelola (Penyedia)	-	-	56.951.809	-	54.364.780	95,46	100,00	2.587.029	4,54		
15		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	166.083.000	166.083.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	166.083.000	-	165.891.000	99,88	100,00	192.000	0,12		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		177.789.922	209.694.922				209.694.922	-	141.795.010	67,62	80,00	67.899.912	52,32		
16		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.000.000	46.000.000	Swakelola (Penyedia)			46.000.000		27.308.500	59,37	100,00	18.691.500	40,63		

17		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.750.000	119.655.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	119.655.000	-	78.062.920	65,24	100,00	41.592.080	34,76		
18		Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Mebel	3.000.000	3.000.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	3.000.000	-	-	0,00	0,00	3.000.000	100,00		
19		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.040.000	21.040.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	21.040.000	-	17.500.000	83,17	100,00	3.540.000	16,83		
20		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.999.922	19.999.922	Swakelola (Penyedia)	-	-	19.999.922	-	18.923.590	94,62	100,00	1.076.332	5,38		
2.	Program Pemberdayaan Sosial			327.882.043	408.808.768				408.808.768	-	362.053.507	88,56	100,00	46.755.261	10,00		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota		327.882.043	408.808.768				408.808.768	-	362.053.507	88,56	100,00	46.755.261	10,00		
21		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	159.901.968	151.263.393	Swakelola (Penyedia)	-	-	151.263.393	-	122.894.657	81,25	100,00	28.368.736	18,75		
22		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	79.346.115	68.911.415	Swakelola (Penyedia)	-	-	68.911.415	-	66.473.500	96,46	100,00	2.437.915	3,54		
23		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		100.000.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	100.000.000	-	97.848.800	97,85	100,00	2.151.200	2,15		
24		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	88.633.960	88.633.960	Swakelola (Penyedia)	-	-	88.633.960	-	74.836.550	84,43	100,00	13.797.410	15,57		
3.	Program Rehabilitasi Sosial			496.247.420	472.694.420				472.694.420	-	391.808.972	82,89	100,00	80.885.448	48,01		
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		423.364.670	386.814.670				386.814.670	-	352.522.822	91,13	100,00	34.291.848	10,44		
25		Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	215.740.750	215.740.750	Swakelola (Penyedia)	-	-	215.740.750	-	212.227.500	98,37	100,00	3.513.250	1,63		
26		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	141.020.250	109.270.250	Swakelola (Penyedia)	-	-	109.270.250	-	95.502.340	87,40	100,00	13.767.910	12,60		
27		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	66.603.670	61.803.670	Swakelola (Penyedia)	-	-	61.803.670	-	44.792.982	72,48	100,00	17.010.688	27,52		
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		72.882.750	85.879.750				85.879.750	-	39.286.150	45,75	100,00	46.593.600	85,59		
28		Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	6.909.750	9.906.750	Swakelola (Penyedia)	-	-	9.906.750	-	6.680.000	67,43	100,00	3.226.750	32,57		
29		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	16.500.000	16.500.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	16.500.000	-	1.500.000	9,09	100,00	15.000.000	90,91		
30		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	49.473.000	59.473.000	Swakelola (Penyedia)	-	-	59.473.000	-	31.106.150	52,30	100,00	28.366.850	47,70		
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			497.094.362	738.336.850				738.336.850	-	481.414.604	65,20	83,68	256.922.246	95,41		
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		497.094.362	738.336.850				738.336.850	-	481.414.604	65,20	83,68	256.922.246	95,41		
31		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	340.678.650	474.938.638	Swakelola (Penyedia)	-	-	474.938.638	-	462.351.354	97,35	97,35	12.587.284	2,65		
32		Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	156.415.712	263.398.212	Swakelola (Penyedia)	-	-	263.398.212	-	19.063.250	7,24	70,00	244.334.962	92,76		
5.	Program Penanganan Bencana			444.430.180	444.430.180				444.430.180	-	388.706.200	87,46	100,00	55.723.980	12,54		

		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		444.430.180	444.430.180				444.430.180	-	388.706.200	87,46	100,00	55.723.980	12,54		
33		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	444.430.180	444.430.180	Swakelola (Penyedia)	-	-	444.430.180	-	388.706.200	87,46	100,00	55.723.980	12,54		
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			86.975.400	86.975.400				86.975.400	-	82.405.000	94,75	100,00	4.570.400	5,25		
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		86.975.400	86.975.400				86.975.400	-	82.405.000	94,75	100,00	4.570.400	5,25		
34		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	86.975.400	86.975.400	Swakelola (Penyedia)	-	-	86.975.400	-	82.405.000	94,75	100,00	4.570.400	5,25		
7.	Program Pnegarusutamaan Gender dan			457.383.073	517.180.698				517.180.698	-	509.312.773	99,32	100,00	7.867.925	0,46		
		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender PUG pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota		34.547.070	34.547.070				34.547.070	-	30.192.917	87,40	100,00	4.354.153	17,04		
35		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	18.758.590	18.758.590	Swakelola (Penyedia)	-	-	18.758.590	-	17.095.037	91,13	100,00	1.663.553	8,87		
36		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	15.788.480	15.788.480	Swakelola (Penyedia)	-	-	15.788.480	-	13.097.880	82,96	100,00	2.690.600	17,04		
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/ Kota		408.542.995	468.340.620				468.340.620	-	465.143.706	99,32	100,00	3.196.914	0,46		
37		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	17.684.400	17.684.400	Swakelola (Penyedia)	-	-	17.684.400	-	16.575.150	93,73	100,00	1.109.250	6,27		
38		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	390.858.595	450.656.220	Swakelola (Penyedia)	-	-	450.656.220	-	448.568.556	99,54	100,00	2.087.664	0,46		
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota		14.293.008	14.293.008				14.293.008	-	13.976.150	97,78	100,00	316.858	2,22		
39		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	14.293.008	14.293.008	Swakelola (Penyedia)	-	-	14.293.008	-	13.976.150	97,78	100,00	316.858	2,22		
8.	Program Perlindungan Perempuan			126.224.672	103.865.803				103.865.803	-	89.449.911	86,12	100,00	14.415.892	13,88		
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		126.224.672	103.865.803				103.865.803	-	89.449.911	86,12	100,00	14.415.892	13,88		
40		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	126.224.672	103.865.803	Swakelola (Penyedia)	-	-	103.865.803	-	89.449.911	86,12	100,00	14.415.892	13,88		
9.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			42.703.164	42.703.164				42.703.164	-	42.600.300	99,76	100,00	102.864	0,24		
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		42.703.164	42.703.164				42.703.164	-	42.600.300	99,76	100,00	102.864	0,24		
41		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	42.703.164	42.703.164	Swakelola (Penyedia)	-	-	42.703.164	-	42.600.300	99,76	100,00	102.864	0,24		
10.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			186.167.434	173.203.252				173.203.252	-	166.490.740	96,12	100,00	6.712.512	10,11		
		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		14.821.619	12.046.619				12.046.619	-	9.720.344	80,69	100,00	2.326.275	19,31		

			17.000.000	18.000.000		18.190.000	18.700.000	97,28	180,00	4.966.227	4,24
40		Pengadaan dan Pengembangan Layanan Perawatan Kesehatan Untuk Kemandirian Keluarga Kota	871.345.813	1.811.126.603	Swasta (Peyada)	881.196.613	2.811.770.396	97,38	190,35	4.966.227	4,24
41	Program Perlindungan Kesehatan Anak		71.897.849	85.328.034		85.328.034	85.373.448	99,75	180,00	114.540	100,00
		Pengadaan dan Pengembangan Layanan Perawatan Kesehatan bagi Anak yang Menjalankan Perlindungan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	71.897.849	85.328.034		85.328.034	85.173.448	99,75	180,00	114.540	100,00
42		Koordinasi dan Pelaksanaan Pemantauan Kapasitas Sumber Daya Layanan Perawatan Anak yang Menjalankan Perlindungan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	71.911.209	81.328.034	Swasta (Peyada)	85.328.034	85.173.448	99,75	180,00	114.540	9,24
TOTAL			18.394.692.863	19.992.821.341		19.992.821.341	1.946.028.478	99,66	98,31	974.796.583	8,94

